

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**FAKTOR CERAH GUGAT PEGAWAI NEGERI SIPIL
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di
Pengadilan Agama Bangkinang Kelas 1B)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas Akhir dan Memenuhi Syarat
Guna untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)



OLEH

INSINUR SAPUTRI

NIM, 11721201125

**JURUSAN HUKUM KELUARGA
FAKULTAS SARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU**

2021



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “ **Faktor Cerai Gugat Pegawai Negeri Sipil ,
Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Bangkinang
Kelas IB)** “ yang ditulis oleh :

Nama : Insinur Saputri
NIM : 11721201125
Program Studi : S1 Hukum Keluarga

Dapat diterima dan disetujui untuk diajukan dalam sidang Munaqasah
Fakultas Syariah dan Hukum Unirvesitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 03 Mei 2021
Pembimbing skripsi


Dr. Akmal Munir, Lc, MA
NIP. 19711006 200212 1003

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“FAKTOR CERAH GUGAT PEGAWAI NEGERI SIPIL PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KAUSUS DI PENGADILAN AGAMA BANGKINANG KELAS 1B)”**, yang ditulis oleh:

Nama : **INSINUR SAPUTRI**
 NIM : **11721201125**
 Program Studi : **Hukum Keluarga**

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari / Tanggal : **Selasa, 08 Juni 2021**
 Waktu : **13.00 WIB**
 Tempat : **Daring/Online**

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 21 Juni 2021

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Wahidin, M.Ag

Sekretaris
Haniah Lubis, ME.Sy

Penguji I
Dr. M. Ihsan, M.Ag

Penguji II
Dr. H. Akmal Abdul Munir, LC, MA

(Signatures of the Exam Panel Members)



Mengetahui :
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag.
 NIP. 19580712 1986031 005

ABSTRAK

Insinur Saputri, (2021): Faktor Cerai Gugat Pegawai Negeri Sipil (Studi Kasus di Pengadilan Agama Bangkinang Kelas 1B)

Perceraian merupakan perbuatan halal yang dibenci oleh Allah, sehingga ada ulama yang malarang terjadinya thalak tanpa alasan syar'i, begitu pula dengan ketentuan hukum Islam di Indonesia, dalam hal isteri melakukan permohonan cerai gugat juga dilakukan dengan alasan sesuai aturan yang ada. Tingginya kasus perceraian di Pengadilan Agama semakin tahun semakin meningkat. Secara sosial pihak yang mengajukan perceraian tidak hanya berasal dari masyarakat menengah kebawah namun juga dilakukan oleh para Pegawai Negeri Sipil. Peneliti menjadi tertarik untuk melakukan penelitian dengan memilih populasinya para Pegawai Negeri Sipil melalui sebuah putusan hakim, maka menjadi menarik untuk meneliti apa saja penyebab dari seorang isteri yang mengajukan cerai gugat thalak di Pengadilan Agama Bangkinang, dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap faktor cerai gugat PNS di Pengadilan Agama Bangkinang

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum Islam normatif yang dilaksanakan menggunakan metode *library research* atau penelitian kepustakaan. Adapun sumber data yang digunakan adalah data primer, yaitu dokumen putusan cerai di Pengadilan Agama Bangkinang dari tahun 2018-2020 dan data sekunder, yaitu buku-buku yang berhubungan dengan penelitian. Data akan dianalisa dengan metode kualitatif.

Berdasarkan analisis data yang dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa faktor penyebab terjadinya cerai gugat yang didalilkan isteri PNS. Dalam putusan Hakim mengabulkan permohonan isteri dengan melihat fakta persidangan bahwa kedua pihak telah terjadi perselisihan, meninggalkan rumah kediaman bersama lebih dari dua bulan. Dalam hal hakim melihat tidak ada lagi keharmonisan yang akan dicapai oleh keduanya untuk meneruskan perkawinan, maka demi kemashlahatan bersama hakim memutuskan perkara cerai thalak sesuai permohonan suami dengan menetapkan konsekuensi dari akibat perceraian tersebut.

Kata kunci; Cerai gugat, PNS, Pengadilan



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Faktor Cerai Gugat PNS (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Bangkinang kelas 1B)”**.

Shalawat serta salam untuk baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari kehidupan yang penuh kebodohan sampai kepada kehidupan yang penuh dengan ilmu pengetahuan sebagaimana yang kita rasakan sekarang ini.

Dengan penuh rasa syukur, pada kesempatan ini penulis ucapkan terima kasih kepada:

1. Ayahanda tercinta, ibunda tercinta Zumarani, Saudara-saudara saya (Syamsyurizal, Syahrul Mazni, dan zulkifli) dan saudari-saudari saya (Yuhaini, wardani, dan Al Misrani) beserta keluarga saya lainnya yang selalu memberikan semangat, do'a dan restunya dalam penyelesaian skripsi ini.
2. Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag sebagai plt. Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta Bapak Drs H. Suryan A. Jamrah, Ma sebagai Wakil Rektor I, Bapak Dr. H. Kusnedi, M.pd sebagai Wakil Rektor II, dan Bapak Drs H. Promadi, MA., Ph.d sebagai Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Bapak Dr. H. Hajar M. Ag sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta Bapak Dr. Heri Sunandar, M. CL sebagai Wakil Dekan I, Bapak Wahidin, M. Ag sebagai Wakil Dekan II, dan Bapak H. Maghfirah, MA sebagai Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum.
4. Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc. MA. selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga sekaligus selaku pembimbing yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini sehingga bisa diselesaikan sesuai dengan yang diharapkan.
5. Bapak Ade Fariz Fahrullah, M. Ag selaku Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga yang selalu memberikan kontribusi ilmu pengetahuan kepada penulis selama menimba ilmu di kampus Uin Suska Riau.
6. Bapak Muhammad Ahmad Fauzi, S.H.I., M.H selaku pembimbing akademik yang senantiasa selalu memberikan motivasi dan semangat yang luar biasa.
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen beserta Kepada seluruh pegawai Fakultas Syari'ah dan Hukum yang tidak dapat disebutkan satu persatu, atas tauladan dan kesabaran Bapak dan Ibu mengajarkan ilmu-ilmu dalam perkuliahan.
8. Kepala Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta rekan-rekannya yang telah memberikan pelayanan fasilitas literatur sebagai sumber data sekunder dalam pembuatan skripsi ini.
9. Bapak Drs. H. Rudi Hartono, S. H selaku ketua Pengadilan Agama Bangkinang beserta jajarannya yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian di Pengadilan Agama Bangkinang kelas 1B.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10. Kepada kepala perpustakaan kabupaten Kampar beserta karyawan yang telah menyediakan buku-buku literatur kepada penulis.

11. Kepada rekan-rekan terbaik saya Murni Emelda, Feni Al Fira, Sri Wahyuni, Nuzul badi Marifatullah, Era Zulfialina, Nurul Azizah dan yang telah meluangkan waktu, memberikan perhatian, semangat dan bantuan berupa tenaga serta pemikiran-pemikirannya yang luar biasa sehingga penulis selalu bersemangat untuk menyelesaikan skripsi ini.

12. Teman-teman seperjuangan angkatan 2017 Jurusan Hukum Keluarga terkhusus kepada lokal AH (A) yang telah banyak memberikan dukungan, masukan serta motivasi kepada peneliti sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.

Mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan semua pihak serta menjadi amal jariyah. Aamiin.

Pekanbaru, 30 April 2021

Penulis,

INSINUR SAPUTRI
NIM. 11721201125



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	7
E. Metode Penelitian.....	8
F. Sistematika Penelitian	11
BAB II GAMBARAN UMUM PENGADILAN AGAMA BANGKINANGKELAS 1B	
A. Deskripsi Umum Tentang Pengadilan Agama Bangkinang Kelas 1B	13
B. Peradilan Agama	21
BAB III LANDASAN TEORI	
A. Pengertian perceraian	42
B. Hukum Perceraian	44
C. Macam-Macam Thalak	48
D. Faktor Perceraian.....	58
E. Bentuk-Bentuk Perceraian.....	63



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Faktor Cerai Gugat PNS di Pengadilan Agama Bangkinang.....	89
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Faktor terjadinya Cerai Gugat PNS di Pengadilan Agama Bangkinang	97

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	107
B. Saran.....	108

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

- A. Surat Keputusan Hakim
- B. Pedoman Wawancara
- C. Foto Wawancara

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel IV.1	Daftar Angka perceraian	90
Tabel IV.2	Penyebab Terjadinya Cerai gugat	90





BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan institusi yang sangat penting dalam masyarakat. Eksistensi institusi ini adalah melegalkan hubungan hukum antara seorang laki-laki dengan seorang wanita. Yang dimaksud pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan keTuhanan yang Maha Esa (Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974).¹ Pengertian pernikahan tersebut yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 berprinsip, pada tujuan pernikahan yang bahagia dan kekal.² Sahnya suatu pernikahan adalah pernikahan yang dilaksanakan menurut masing-masing agama dan kepercayaan yang dianut oleh pasangan suami isteri dan dicatat menurut menurut perundang-undangan yang berlaku.

Hubungan pernikahan menciptakan timbulnya hak dan kewajiban suami dan isteri antara seorang pria dengan seorang perempuan, baik hak dan kewajiban masing-masing maupun bersama dalam keluarga. Dengan kata lain, pernikahan menimbulkan peranan dan tanggung jawab suami dan isteri dalam keluarga, baik masing-masing maupun sendiri-sendiri. Pihak pria dan pihak wanita tidak bisa menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan akibat-akibat yang timbul dari suatu perkawinan. Pada hakikatnya pernikahan itu adalah suatu perjanjian karena

¹ Salim HS, *Pengantar HALukum Perdata Tertulis* (BW), (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hal. 61

² Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: PT. Rineke Cipta, 1991), hal. 7.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adanya persetujuan atau perjanjian (perkawinan) sejak semula ditentukan oleh hukum (Lihat Pasal 6 UU No. 1 Tahun 1974 ayat (1): Pernikahan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai).

Keberhasilan dalam pernikahan yang kekal tidaklah mudah, harus ada saling pengertian, kerja sama, dan kesetiaan agar tujuan pernikahan yang kekal terwujud. Konflik dalam keluarga dapat mengurangi keharmonisan dalam keluarga karena tidak adanya saling pengertian, kerja sama dan kesetiaan. Akibat tidak harmonisnya keluarga yang terus-menerus terjadi maka bisa terjadi kesepakatan untuk tidak mempertahankan rumah tangganya dan memilih untuk bercerai. Perceraian adalah dinamika rumah tangga. Adanya perceraian karena adanya pernikahan, meskipun tujuan dari pernikahan bukan perceraian. Bercerai dapat disebabkan oleh kematian, dapat pula karena rumah tangga tidak cocok dan pertengkaran selalu menghiasi perjalanan rumah tangga, bahkan ada pula bercerai karena salah satu dari suami atau isteri tidak lagi fungsional secara biologi.

Perceraian adalah terputusnya ikatan keluarga yang disebabkan karena salah satu atau dua pasangan memutuskan untuk saling meninggalkan, dengan demikian berhentilah kedua pasangan suami isteri untuk memenuhi kewajiban perannya dalam rumah tangga termasuk dalam kekacauan rumah tangga.³ Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Pernikahan dan juga dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 disebutkan bahwa alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah:

³ Anik Farida dkk, *Perempuan dalam Sistem Perkawinan dan Perceraian di Berbagai Komunitas Adat*, (Jakarta: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Jakarta, 2007), hal. 1

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu meninggalkan yang lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain karena hal lain diluar kemauan.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami atau isteri.
6. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Tuntutan perceraian hanya dapat diajukan oleh pihak yang tidak bersalah dengan alasan tersebut. Maksud pembentuk Undang-Undang, ialah agar perceraian itu hanya dimungkinkan jika fakta seperti tersebut di atas benar-benar terjadi.⁴ Menurut Undang-Undang Pernikahan, yang dimaksud perceraian adalah penjaTuhan thalak.

Menurut ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Pernikahan, bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selain itu untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri

⁴ Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2010), hal. 135.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

itu tidak dapat hidup rukun sebagai suami isteri. Konflik yang terus menerus dalam rumah tangga dan tidak dapat menemukan keharmonisan, sehingga perceraian sebagai jalan untuk mengakhiri konflik. Dampak perceraian bukan hanya mengakhiri konflik diantara suami-isteri, akan tetapi berdampak juga kepada anak dan keluarga dikedua pihak. Kasus perceraian terjadi kepada siapa saja baik tokoh masyarakat, pejabat negara, artis maupun Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Pegawai Negeri Sipil, menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, “Pegawai” berarti” orang yang bekerja pada pemerintah (perusahaan dan sebagainya) sedangkan “Negeri” berarti negara atau pemerintah, jadi Pegawai Negeri Sipil adalah orang yang bekerja pada pemerintah atau negara.⁵ Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai manusia biasa memiliki naluri psikis dan biologis yang sama dengan lainnya, hanya saja status yang membedakan dengan yang lainnya. Sangat manusiawi apabila memiliki keinginan untuk melakukan pernikahan dan perceraian.⁶

Pada dasarnya perundang-undangan di Indonesia bidang keluarga, utamanya bersifat umum yang maksudnya diperuntukan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Namun pada kenyataannya, terdapat Undang-Undang khusus seperti Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1983 tentang izin pernikahan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil di dalamnya pejabat. Adanya pengkhususan ini, dikarenakan PNS dan pejabat merupakan unsur aparatur negara dan abdi

⁵ Sri Hartini, dkk., *Hukum Kepegawaian di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal. 31

⁶ Rismiati, “*Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Putusanya bagi Pegawai Negei Sipil di Pengadilan Agama Yogyakarta*” skripsi sarjana Al-Ahalwal asy-Syakhsiyyah, Fakultas Syariah, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta (2010), hal. 5

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat yang harus menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dalam bertingkah laku, bertindak, dan taat pada peraturan yang berlaku termasuk dalam menyelenggarakan kehidupan berkeluarga.⁷

Atas dasar pokok pikiran yang disebutkan sebelumnya dan dalam rangka usaha peningkatan disiplin PNS dalam melakukan pernikahan dan perceraian, dipandang perlu untuk menetapkan peraturan pemerintah mengenai izin pernikahan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, yaitu sebagaimana diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Pernikahan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. Sebagai tindak lanjutnya dikeluarkan Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 08/SE/1983 tentang Izin Pernikahan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. Hal tersebut sesuai dengan asas *lex specyalist derogat legi general*: hukum yang khusus lebih diutamakan dari pada hukum yang umum. Artinya, suatu ketentuan yang bersifat mengatur secara umum dapat dikesampingkan oleh ketentuan yang lebih khusus mengatur hal yang sama.⁸

Menurut Waskito Reksosoedirdjo, Kepala Badan Administrasi Negara tahun 1992, bahwa Pegawai Negeri Sipil (PNS) merupakan aparatur negara, pejuang dan pelopor dalam melaksanakan pembangunan nasional. Oleh karena itu rumah tangganya harus selalu dibina, sehingga dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari tidak akan terganggu oleh masalah-masalah rumah tangga. Didalam usaha untuk meningkatkan disiplin tersebut, telah ditetapkan Peraturan

⁷ Rachalmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hal. 416.

⁸ Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hal. 112

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemerintah No. 10 Tahun 1983 sebagaimana telah diadakan perubahan atas ketentuan dengan Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 yang mengatur mengenai izin-izin pernikahan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.⁹

Disisi lain Pegawai Negeri Sipil sebagai aparatur negara tentunya sangat berbeda dengan masyarakat sipil biasa, dari segi pendidikan maupun tata cara dalam hal pengajuan cerai yang akan dilakukan. Bagi masyarakat sipil biasa persyaratan pengajuan gugatan perceraian yang akan dilakukan hanya menggunakan KTP dan buku akta nikah yang bersangkutan.

Namun perceraian Pegawai Negeri Sipil sebenarnya dilarang ada sanksi dan Undang-Undang yang mengatur, karena Pegawai Negeri Sipil (PNS) merupakan unsur aparatur negara, abdi negara, dan abdi masyarakat dalam tingkah laku, tindakan, dan ketaatan kepada peraturan perundang-undangan, termasuk dalam menyelenggarakan kehidupan rumah tangga. Kehidupan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dapat melaksanakan tugasnya dengan baik tanpa harus terganggu oleh masalah keluarga.

Melihat kondisi yang terjadi di Pengadilan Agama Bangkinang pada tahun 2018–2020, perkara cerai gugat merupakan salah satu kasus yang mendominasi. Maka penulis tertarik untuk memilih dan membahas alasan-alasan apa saja yang menyebabkan cerai gugat Pegawai Negeri Sipil di Pengadilan Agama Bangkinang.

⁹ Soegeng Prijarminto, *Duri dan Mutiara dalam Perkawinan PNS* (Jakarta: Pradyna Paramita, 1992), hal. 11.

Berdasarkan dari latar belakang di atas maka penulis ingin mengadakan penelitian dan menuliskan dalam bentuk skripsi dengan judul **“FAKTOR CERAII GUGAT PEGAWAI NEGERI SIPIL PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Pengadilan Agama Bangkinang Kelas 1 B)**

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dipersoalkan maka perlu adanya pembatasan masalah dalam penelitian ini. Dengan demikian penulis hanya meneliti tentang Faktor Cerai Gugat Pegawai Negeri Sipil Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kelas 1B).

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis dapat membuat suatu perumusan masalah adalah sebagai berikut:

- a. Apa saja faktor-faktor penyebab terjadinya cerai gugat bagi pasangan Pegawai Negeri Sipil di Pengadilan Agama Bangkinang ?
- b. Bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap faktor cerai gugat bagi pasangan Pegawai Negeri Sipil di Pengadilan Agama Bangkinang ?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui Cerai Gugat Bagi Pasangan Pegawai Negeri Sipil di Pengadilan Agama Bangkinang.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam Terhadap Alasan Cerai Gugat Bagi Pasangan Pegawai Negeri Sipil di Pengadilan Agama Bangkinang.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah :

- a. Sebagai syarat mengajukan skripsi pada Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan informasi bagi pihak-pihak lain yang mengadakan penelitian terhadap permasalahan yang berkaitan di masa yang akan datang.
- c. Menambah wawasan bagi penulis dan mengetahui, membahas serta menetapkan hukum terhadap suatu fakta/kenyataan.

E. Metode Penelitian

Adapun untuk metode penelitian tugas akhir (skripsi) terdiri dari :

1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian ini yaitu hukum islam Normatif atau penelitian hukum kepustakaan (Library research) yaitu, penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data primer.¹⁰ Dalam penelitian ini yang dicari adalah dokumentasi putusan pengadilan agama dalam memutuskan penyebab dikabulkannya cerai gugat.

¹⁰ Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), cet. Ke-1 hal. 12

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Objek Penelitian

Objek yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah putusan-putusan terhadap faktor cerai gugat yang diambil di Pengadilan Agama Bangkinang.

3. Sumber Data

Sumber data yang utama dalam penelitian ini adalah data kepustakaan atau data sekunder¹¹, didalam kepustakaan hukum. Adapun sumber data dalam penelitian deskriptif ini terdiri dari :

a. Data primer

Putusan pengadilan tentang cerai gugat PNS yang berjumlah 28 pada tahun 2018, 14 pada tahun 2019 dan 20 pada tahun 2020. Dalam penelitian ini penulis mengambil 2 putusan di tahun 2018, 2 putusan di tahun 2019 dan 2 putusan di tahun 2020.

b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan pustaka, buku-buku yang berkaitan dengan masalah penelitian yang diteliti, hasil penelitian dalam bentuk laporan, majalah, jurnal-jurnal, peraturan perundang-undangan dan dokumen-dokumen lainnya.¹²

c. Data Tersier yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedi terkait tentang cerai gugat .¹³

¹¹Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2008), cet. Ke-1, hal. 119

¹²*Ibid.*,

¹³Emzir, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2010), hal. 14

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam metode pengumpulan data ini, penulis menggunakan metode dokumentasi yaitu sebuah metode yang dilakukan dengan cara mencari dan mengkaji data-data dari buku-buku, catatan-catatan, dan sebagainya yang berkaitan dengan penulisan ini.

5. Analisis Data

Metode yang penulis gunakan untuk menganalisa data adalah metode kualitatif, yaitu setelah penulis mengumpulkan data kemudian melakukan analisa dengan cara menghubungkan dengan teori dan bahan bacaan, selanjutnya diambil kesimpulan sehingga memperoleh gambaran yang utuh terhadap masalah yang akan diteliti. Dan penguat dari penelitian ini juga melakukan wawancara bersama hakim Pengadilan Agama Bangkinang.

6. Metode penulisan

Dalam penulisan penelitian tugas akhir ini, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

a. Deduktif

Metode deduktif adalah suatu uraian penulisan yang diawali dengan menggunakan kaidah-kaidah umum, kemudian dianalisa dan diambil kesimpulan secara khusus.¹⁴

¹⁴Burhan Bangin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2008), Ed.1, Cet-2, hal. 108

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Deskriptif

Metode deskriptif adalah suatu uraian penulisan yang menggambarkan secara utuh dan apa adanya tanpa mengurangi dan menambahnya sekalipun sesuai dengan keadaan sebenarnya.¹⁵

F. Sistematika penulisan

Untuk mempermudah para pembaca dalam memahami penelitian ini, maka penulis mengklarifikasikan penelitian dalam bab yang terdiri dari sub bab dengan rincian sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini akan menjelaskan tentang latar belakang, batasan dan rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, teknik analisa data dan sistematika penulisan.

BAB II : Sekilas Tentang Peradilan Agama Bangkinang

Profil Pengadilan Agama Bangkinang : berisikan tentang sejarah, visi dan misi, tugas pokok, fungsi, dan struktur organisasi Pengadilan Agama Bangkinang kelas 1B.

BAB III : LANDASAN TEORI

Bab dari landasan teori yang berisikan tentang teori yang berhubungan dengan pembahasan dalam penelitian ini. Diantaranya terdiri dari pengertian perceraian, dasar hukum perceraian dan hukum perceraian, faktor perceraian, alasan perceraian dalam Islam, bentuk-bentuk perceraian.

¹⁵ Burhan Bangin, *Op.Cit.*, hal. 108

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV : HASIL PENELITIAN

Bab ini akan menjelaskan tentang faktor cerai gugat bagi pasangan Pegawai Negeri Sipil di Pengadilan Agama Bangkinang. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap faktor cerai gugat bagi pasangan Pegawai Negeri Sipil di Pengadilan Agama Bangkinang.

BAB V : KESIMPULAN

Bab ini merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran yang diperoleh dari bab sebelumnya dalam penelitian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM PENGADILAN AGAMA BANGKINANG KELAS 1B

A. Deskripsi Umum Tentang Pengadilan Agama Bangkinang

1. Sejarah Pengadilan Agama Bangkinang Kelas 1B

Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1957 tentang pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'ah diluar Jawa dan Madura (Lembaga Negara Tahun 1957 Nomor 99) dasar berdirinya Pengadilan Agama Bangkinang. Pengadilan Agama Bangkinang Kelas IB berdiri pada tanggal 5 Mei 1960 sebagai realisasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1957 yang berkedudukan di Bangkinang. Jika kita melihat pada sejarah lahirnya Pengadilan Agama Kelas IB Bangkinang ini erat hubungannya dengan sejarah pemerintah daerah Kabupaten Kampar. Penetapan Bangkinang sebagai ibu kota Kabupaten didasarkan pada Undang-Undang Nomor 12 tahun 1956. Sedangkan pada saat berdirinya Pengadilan Agama Bangkinang Kelas IB ibu kota Kabupaten Kampar masih berkedudukan di Pekanbaru dan barulah pada tanggal 5 Juni 1967 pemindahan ibu kota Kabupaten Kampar dari Pekanbaru ke Bangkinang dengan dipimpin oleh seorang bupati bernama Kolonel R. Soebrantas. Pada saat berdirinya Pengadilan Agama Bangkinang Kelas IB tepatnya tanggal 5 Mei 1960, Ketua Pengadilan Agama Bangkinang Kelas IB dirangkap oleh ketua Pengadilan Agama Pekanbaru yaitu Bapak K. H. Abd. Malik dan dua orang karyawan pada waktu itu masing-masing:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Abbas Hasan
2. Abd. Rahman Rasyid.

Walaupun personil Pengadilan Agama Bangkinang Kelas IB waktu itu sangat minim sekali ditambah dengan sarana gedung belum memadai serta sarana administrasi sangat kurang sekali, namun Pengadilan Agama terus maju dan berlanjut dengan fungsinya sebagai sebuah badan Pengadilan Agama yang pada saat itu berada di bawah Departemen Agama Republik Indonesia. Pada awal berdirinya Pengadilan Agama Bangkinang belum mempunyai kantor, jadi Pengadilan Agama Bangkinang beberapa kali mengalami pindah kantor, hingga akhirnya mempunyai kantor sendiri yang di bantu oleh Pemerintah Kabupaten Kampar yang bisa dilihat seperti saat sekarang ini, pada awal tugasnya ketua Pengadilan Agama masih berkantor di Pekanbaru sehingga ketua Pengadilan Agama Bangkinang bolak-balik Pekanbaru–Bangkinang untuk menyelesaikan urusan pekerjaan Pengadilan Agama Bangkinang. Pada saat berdirinya Pengadilan Agama Bangkinang masih menyewa kantor di dekat kantor Dinas Sosial di Lapangan Merdeka dekat Tugu Mahmut Marzuki, kemudian pada tahun 1960 menyewa rumah penduduk bernama Male sebagai kantor, didepan RSUD Bangkinang lama sampai tahun 1968. Pada tahun 1968 Pengadilan Agama Bangkinang pindah ke jalan Sudirman dan membeli tanah untuk dijadikan kantor yang dianggarkan oleh Departemen Agama, pada saat itu hanya dibangun ruang sidang, ruang ketua hakim, ruang panitera, dan ruangan umum. Pada tahun 2005 Pengadilan Agama Bangkinang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mendapatkan bantuan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar berupa bantuan perluasan gedung, sehingga Pengadilan Agama Bangkinang pindah untuk pembangunan gedung selama satu tahun. Pada saat pembangunan kantor Pengadilan Agama Bangkinang, berkantor sementara di gedung KPU Kabupaten Kampar sampai tahun 2006. Selang beberapa lama gedung Pengadilan Bangkinang mengalami pembaharuan kembali tepatnya pada tahun 2012, yang di anggarkan dari Mahkamah Agung hingga menjadi seperti saat ini sekarang. Lama pembangunannya selama 2 tahun dan diselesaikan pada tahun 2014, selama reNovasi Pengadilan Agama Bangkinang berkantor di Dinas Peternakan Kabupaten Kampar. Pada saat terbentuknya Pengadilan Agama Bangkinang, seluruh Pengadilan Agama di wilayah Riau termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Padang, dan baru pada tahun 1987 Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru terbentuk dan sejak itu Pengadilan Agama Kelas IB Bangkinang masuk ke dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru. Sejak tanggal 5 Juni 1967, semua Instansi pemerintah Daerah tingkat II Kabupaten Kampar (*sebutan sebelum keluarnya Undang-Undang No 32 Tentang Otonomi Daerah*) telah dapat berkantor di Bangkinang, walaupun waktu itu sarana perkantoran masih belum lengkap.

2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Bangkinang Kelas 1B

Visi.

Mewujudkan Pengadilan Agama Bangkinang yang beribawa dan agung

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Misi

- a. Mewujudkan Peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparansi
- b. Meningkatkan profesionalisme hakim dan seluruh aparat Pengadilan Agama Bangkinang
- c. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisiensi yang berkesinambungan
- d. Mewujudkan pelayanan prima dengan para pencari keadilan
- e. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

3. Tugas dan Fungsi Peradilan

a. Tugas Pokok

Sebagai salah satu Badan Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman Pengadilan Agama mempunyai tugas pokok, yaitu

- 1) Menerima,
- 2) Memeriksa,
- 3) Memutuskan, dan
- 4) Menyelesaikan.

Artinya keempat hal diatas merupakan tugas pokok karena di dalam dunia peradilan kita menganut azas bahwa ” Hakim tidak boleh meNolak setiap perkara yang diajukan denga alasan hukum tidak jelas atau tidak ada yang mengaturnya/tentang tugas pokok Peradilan Agama juga telah di atur di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2004 jo Pasal 49, 51, 52, dan 53, Pasal 1 dan 2 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya.

Adapun setelah adanya lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama kompetensi absolut Peradilan Agama bertambah sehingga kompetensi absolut Peradilan Agama paska Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 meliputi penyelesaian sengketa bidang;

- 1) Perkawinan,
- 2) Kewarisan,
- 3) Wasiat,
- 4) Perwakafan,
- 5) Zakat,
- 6) Infaq sadaqah, dan
- 7) EkoNomi,

EkoNomi syari'ah, antara lain Bank Syari'ah, Lembaga Keuangan, Mikro Syari'ah, Asuransi Syari'ah, Reasuransi Syari'ah, Reksasana Syari'ah, Obligasi Syari'ah, dan surat berharga berjangka menengah Syari'ah, Sekuritas Syari'ah, Pembiayaan Syari'ah, Pegadaian Syari'ah, Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syari'ah dan Bisnis Syari'ah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, maka Pengadilan Agama mempunyai fungsi, antara lain sebagai berikut;

- 1) Fungsi Mengadili (judicial power), yakni memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama pada tingkat pertama,
- 2) Fungsi Pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada masyarakat, karena hakim di Pengadilan Agama merupakan hakim di mata Undang-Undang dan ulama dimasyarakat.
- 3) Fungsi sebagai mediator, Sebelum hakim memutus suatu perkara yang diajukan oleh para pihak maka hakim harus melakukan upaya mediasi untuk perdamaian (KMA. 01 tahun 2008)
- 4) Fungsi Nasehat, yaitu sebelum perkara itu diputus hakim juga harus memberi nasehat agar para pihak yang sedang berseteru itu dapat mengakhiri konflik rumah tangganya dan mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warrahmah.
- 5) Fungsi Administratif, yakni menyelenggarakan administrasi pemerintahan baik administrasi yang menyangkut administrasi umum, administrasi keuangan, administrasi kepegawaian serta administrasi lainnya guna mendukung pelaksanaan tugas pokok teknis peradilan dan administrasi peradilan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Fungsi Lainnya :

- 1) Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya. (vide : Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/004/SK/II/1991).
- 2) Pelayanan pelaksanaan registrasi pengacara praktek kuasa insidentil yang akan beracara di Pengadilan Agama se-wilayah Pengadilan Agama Bangkinang.¹⁶
4. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Bangkinang Kelas 1B

Adapun struktur organisasi Pengadilan Agama Bangkinang kelas 1B sebagai berikut:

- i. Ketua
Drs. H. Rudi HartoNo, SH
- ii. Wakil Ketua
Rahmat Arijaya, S.Ag., M.Ag
- iii. Majelis Hakim
 - c. Mulyas, S.Ag.M.H
 - d. Husnimar, S.Ag.M.H
 - e. Eldaniswati, S.Ag.M.H
 - f. H. Zulkifli, S.Ag
 - g. Ridho Setiawan, S.H.I., M.E.Sy.
 - h. Zulfadli, SHI., M.H
 - i. Mardhiyyatul Husna hasibuan, S.H.I

¹⁶ <http://www.pa-bangkinang.go.id/> (diakses: senin oktober 2020)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

iv. Sekretaris

H. Mustaming, S.Sos

v. Panitera

Drs. Bulgani

vi. Panitera Muda

a. Nurambiya, S.H

b. Nurazmi, S.Ag

c. Sari, Sm.Hk

vii. Panitera Pengganti

a. Yusmaidar, SH.MH

b. Fitradewi, S.Ag

viii. Juru Sita

a. Zainal Abidin, SH

b. Mulyadi

ix. Juru Sita Pengganti

a. Nurbaiti

b. Tomy Andesta Siahaan

x. Analisis Hukum

Meilina Yulien, S.Kom., s.Sy

xi. Ka. Sub Bagian Umum Dan Keuangan,

Fatma Ridha, SHI.

a. Eka Yunia Prafitri A.Md

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Syarifah Maryana S.E.I
 - xii. Ka. Sub. Bagian Kepegawaian
Siti Sahlaini Army, S.Ag. SH.
 - a. Hermawati, A.Md
 - b. Ramlis, SH
 - c. Drs. Sinar, MH
 - d. Rifki Riandi, S.E
 - xiii. Ka.Sub. Bagian Perencanaan TekNologi
Elvris Ninelawati, SE

B. Peradilan Agama

1. Kewenangan Peradilan Agama.

Peradilan agama adalah pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu, yakni hukum keluarga Islam. Pembinaan teknis yustisial bagi peradilan agama sebagaimana bagi lingkungan peradilan yang lain yang dilakukan oleh Mahkamah Agung. Sedangkan pembinaan organisatoris, administratif, dan finansial peradilan agama dilakukan oleh Menteri Agama. Dengan demikian jelaslah bahwa posisi peradilan agama adalah sebagai sun sistem dalam sistem peradilan nasional yang berlaku di Indonesia. Kekuasaan kehakiman itu sendiri merupakan kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia. Dalam melaksanakan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tugasnya sebagai kekuasaan negara yang merdeka, yakni guna menegakkan hukum dan keadilan, maka segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak-pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang.¹⁷

Peradilan agama adalah peradilan khusus. Kekhususannya itu ditunjukkan oleh tiga hal, yaitu :

- a. Kewenangannya meliputi hukum keluarga Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, Sunnah, dan Ijtihad.
- b. Kewenangannya itu hanya berlaku bagi sebagian rakyat Indonesia, yaitu mereka yang memeluk agama Islam.
- c. Tenaga-tenaga teknis pada peradilan agama dipersyaratkan beragama Islam.

Oleh karena itu, pelaksanaan tugas-tugas peradilan agama terutama yang berkaitan dengan penyelesaian perkara tidak mungkin terlepas dari komponen-komponen ajaran agama Islam, ialah akidah, syari'ah, dan akhlak.¹⁸

Kata-kata kewenangan, kekuasaan atau kompetensi, merupakan tiga serangkai yang mengandung satu makna. Bila dikaitkan dengan peradilan sebagai lembaga yudikatif, maka kewenangan, kekuasaan atau kompetensi diartikan dengan "Kekuasaan pengadilan untuk mengadili". Sedangkan kata "mengadili" adalah memproses suatu perkara, diawali dengan pengajuan gugatan kepengadilan kemudian dilanjutkan dengan

¹⁷ Basiq Djalil, *Peradilan Islam* (Jakarta : Amzah, 2009), hal. 3

¹⁸ *Ibid.*, hal. 6

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemeriksaan perkara oleh majlis hakim dan diakhiri dengan pengambilan keputusan yang adil dan benar, untuk kemudian dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum.¹⁹

Pada dasarnya kewenangan pengadilan dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu:

a. Kewenangan Absolut.

Dalam buku karangan Darmawati menyatakan bahwa kewenangan absolut adalah wewenang mutlak pengadilan untuk mengadili berdasarkan materi hukum (hukum materil). Sedangkan menurut Mertokusumo adalah wewenang pengadilan untuk memeriksa jenis perkara tertentu yang secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh peradilan lain.²⁰

Sehubungan dengan hal ini yang menjadi tugas pokok peradilan agama dalam memeriksa perkara, memutuskan dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama adalah:

- 1) Perkawinan.
- 2) Kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam.
- 3) Wakaf dan shadaqah

Berdasarkan pasal 49 UU No.7 Tahun 1989 mengatur hal-hal dalam bidang perkawinan, di antaranya adalah :

¹⁹ Darmawati, *Kewenangan Peradilan Agama*, (Jambi: Sulthan Thata Press, 2010), hal. 6

²⁰ *Ibid.*, hal. 7

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Izin beristeri lebih dari seorang.
- 2) Izin melangsungkan perkawinan bagi yang belum berusia 21 (dua puluh satu tahun) dan hal orang tua atau wali atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat.
- 3) Dispensasi kawin.
- 4) Pencegahan perkawinan.
- 5) Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah.
- 6) Pembatalan perkawinan.
- 7) Gugatan kelalaian atas kewajiban suami atau isteri.
- 8) Perceraian karena thalak.
- 9) Gugatan perceraian.
- 10) Penyelesaian harta bersama.
- 11) Mengenai penguasaan anak-anak.
- 12) Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggungjawab tidak memenuhinya.
- 13) Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas isteri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas isteri.
- 14) Putusan tentang sah atau tidaknya seorang anak.
- 15) Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua
- 16) Pencabutan kekuasaan wali.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 17) Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut.
- 18) Menunjuk seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya, padahal tidak ada penunjukan wali oleh orang tuanya.
- 19) Pembebasan kewajiban ganti kerugian terhadap wali yang telah menyebabkan kerugian atas harta benda anak yang ada dibawah kekuasaanya.
- 20) Penetapan asal-usul seorang anak.
- 21) Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran.
- 22) Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain.²¹

Disamping tugas tersebut peradilan agama juga bertugas melaksanakan hisab rukyat untuk menentukan waktu-waktu ibadah umat Islam dan hari-hari libur nasional. Mengingat posisi dan tugas peradilan agama yang strategis itu, maka peradilan agama mempunyai peran yang sangat penting. Peran itu adalah sebagai berikut:

- 1) Peran pelayanan hukum, dalam pengertian bahwa peradilan agama memberikan kepastian dan status hukum bagi bermacam-macam sengketa keluarga muslim, sehingga keluarga muslim yang

²¹ Bambang Wakuyo, *Implementasi Kekuasaan Kehakiman RI*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1992), hal. 46

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bersangkutan terhindar dari kemungkinan-kemungkinan yang tidak diinginkan.

- 2) Peran pelaksanaan hukum Islam bagi kaum muslimin di Indonesia. Peran ini sangat penting, karena sesuai dengan keimanan dan sistem ajaran Islam.
- 3) Peran pembangunan nasional. Dengan posisinya sebagai bagian integral dari sistem hukum dan peradilan nasional, peradilan agama dapat memberikan kontribusi hukum Islam dalam upaya pembangunan hukum nasional, karena materi hukum Islam diakui sebagai salah satu bahan baku pembentukan hukum.²²

b. Kewenangan Relatif.

Kewenangan relatif adalah kekuasaan pengadilan untuk mengadili berdasarkan wilayah atau daerah. Berdasarkan pengertian tersebut dapat dipahami lebih lanjut dalam pasal 4 UU No. 7 Tahun 1989 jo UU No. 3 Tahun 2006, Pengadilan Agama berkedudukan di ibu kota/kabupaten dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten atau kota. Pengadilan Tinggi berkedudukan di ibu kota provinsi dan daerah hukumnya meliputi daerah provinsi.

Dari pasal 4 tersebut di atas dapat dipahami bahwa Pengadilan Agama maupun Pengadilan Tinggi Agama mempunyai yurisdiksi relatif atau wilayah hukum tertentu, dimana daerah hukumnya sama dengan

²² Darmawati, *Op.cit*, hal.12.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

wilayah atau teritorial telah ditetapkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah.²³

2. Kewenangan Hakim

Pasca Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama, menunjukkan banyak peran hakim peradilan agama yang harus dilaksanakan anatara lain: Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan berkewajiban mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Tugas tersebut dibebankan kepada hakim peradilan agama agar dapat memutuskan perkara yang diajukan kepadanya dengan adil dan benar.

Mukti Ali, ketika menjabat Menteri Agama RI pada penutupan latihan hakim agama mengemukakan bahwa hakim agama harus dapat menggali, memahami, dan menghayati hukum yang hidup dalam masyarakat dengan cara meningkatkan ilmu pengetahuan. Sangat besar bahayanya apabila hakim tidak memiliki ilmu pengetahuan yang cukup.²⁴

Sehubung dengan hal di atas, seorang hakim dapat berijtihad dengan sempurna apabila:

- a. Memiliki pengetahuan yang luas dalam bidang ilmu hukum dan ilmu sosial lainnya.

²³ Darmawati, *Op.cit*, hal.13.

²⁴ M.Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syariah Di Indonesia*(Jakarta: Prenada Media, t.th), Cet. Ke-1, hal. 1

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Harus mengetahui dengan baik kitab Al-Qur'an, Sunnah, Ijma" para ulama, Qiyas, bahasa arab dan tata cara aturan ijtihad yang telah diterapkan oleh syariat Islam.
- c. Mengetahui putusan yusrisprudensi, dan peraturan perundang-undangan lain yang ada kaitannya dengan pelaksanaan hukum di Indonesia ini. Untuk itu harus dipertimbangkan dengan betul untuk dapatnya seseorang diangkat sebagai hakim.

Dengan demikian, hakim peradilan agama dalam menciptakan hukum-hukum baru harus sesuai dengan tata cara berijtihad agar kebenarnnya dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan bobot falsafah pancasila.

Dalam R.I.B pasal 119, pasal 143 R.Bg, hakim (ketua) pengadilan berwenang memberikan nasihat dan pertolongan kepada orang yang menggugat atau kepada wakilnya tentang hal yang memasukan tuntutan. Jadi bantuan diberikan sebelum sidang pada saat memasukan gugatan. Sedangkan dalam pasal 132 R.I.B, pasal 165 R.Bg. "jika dianggap oleh hakim (ketua) yaitu supaya jalanya perkara baik dan teratur, maka pada waktu memeriksa perkara, ia berhak untuk memberikan nasihat kepada kedua belah pihak dan untuk menunjukan upaya hukum dan keterangan kepada mereka yang boleh dipergunakanya."²⁵

Dengan demikian tugas hakim dapat dijabarkan sebagai berikut,

²⁵ Abdullah Sani, *Hakim dan Keadilan Hukum*, (Jakarta: Bulan Bintang Jakarta, 1977), hal.22

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Tugas pokok di bidang peradilan (teknik yudisial), diantaranya adalah:

- 1) Menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya.
- 2) Mengadili menurut hukum dan tidak membeda-bedakan orang.
- 3) Membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan demi tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.
- 4) Tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadili.

b. Tugas yuridis, adalah memberikan keterangan, timbangan dan nasihat-nasihat tentang soal-soal hukum kepada lembaga-lembaga negara apabila diminta.

c. Tugas akademis atau ilmiah yaitu dimana hakim wajib mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.²⁶

3. Syarat-syarat Menjadi Hakim.

Hakim merupakan unsur utama di pengadilan, bahkan ia identik dengan pengadilan itu sendiri. Kebebasan kekuasaan kehakiman sering kali diidentikan dengan kebebasan hakim. Pencapaian penegakan hukum dan keadilan terletak pada kemampuan dan kearifan hakim dalam

²⁶ Magono, *Asas Keadilan Kemanfaatan dan Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2019), hal. 68

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merumuskan keputusan. Berkenaan dengan hal itu muncul idealisasi serta preskripsi tentang hakim.

Di kalangan fuqaha, terdapat beraneka ragam pandangan tentang persyaratan untuk dapat diangkat menjadi hakim, termasuk diantaranya kemampuan berijtihad. Hal lain yang menjadi bahan pembicaraan di kalangan mereka adalah jenis kelamin. Laki-laki merupakan syarat yang disepakati untuk dapat menjadi hakim. Sedangkan perempuan terdapat beragam pandangan.²⁷

Di Indonesia pengangkatan hakim mengalami beberapa tahapan cara. Berdasarkan hasil wawancara Abudullah Sani dengan mantan Kepala Dinas Personel-Depertemen Kehakiman (Ali Moertolo), pengangkatan hakim mengalami perkembangan sebagai berikut:

- 1) Pada awalnya pengangkatan hakim, cukup ditentukan oleh Kementrian Kehakiman berhak menentukan pelamar yang diterima dan diangkat menjadi hakim.
- 2) Setelah itu, Mahkamah Agung menentukan pelamar yang dapat diterima dan Kementrian Kehakiman mengangkat dengan surat keputusan menteri kehakiman.
- 3) Selanjutnya, setiap pelamar harus melalui mahkamah agung dan harus ada persetujuan dari Pengadilan Tinggi, dan baru diajukan kepada Kementrian Kehakiman dan mendapatkan persetujuan dari Kantor Urusan Pegawai (KUP).

²⁷ Cik Hasan Basri, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1996), hal. 181

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) Selanjutnya harus melalui DPTS (Dewan Penempatan Tenaga Sarjana), setelah itu pengumpulan surat-surat yang diperlukan ke Mahkamah Agung, meminta persetujuan ke Pengadilan Tinggi atau Pengadilan Negeri yang akan menerima penempatannya. Setelah itu diusulkan kepada Kementerian Kehakiman oleh Mahkamah Agung, kemudian oleh Kementerian Kehakiman melalui bagian personil dimintakan persetujuan dari Kantor Urusan Pegawai. Setelah disetujui, dengan surat keputusan Menteri Kehakiman diangkat menjadi calon pegawai atau pegawai negeri dengan pangkat Penata Muda-Gol.III/a dan di Pengadilan Negeri diberi jabatan sebagai Penitera Pengganti luar biasa selama enam bulan.
- 5) Setelah tahun 1970 munculah istilah “Cakim” (Calon Hakim). Pada tahap penerimaan permulaan untuk menutupi kekurangan hakim diseluruh wilayah Indonesia, diterima cakim dari Sarjana Hukum sebanyak 500 (Lima Ratus) orang. Dengan melalui testing dan saringan, seleksi dalam ujian dan *psychotes*. Lulusan dari seleksi tersebut untuk sementara ditempatkan disetiap pengadilan negeri ke I diseluruh wilayah hukum Indonesia. Setelah mereka menjadi Pegawai Negeri dan sekurang-kurangnya sudah menjabat sebagai penitera pengganti luar biasa selama satu tahun dan maksimalnya tiga tahun baru dapat diusulkan oleh ketua pengadilan setempat kepada Mahkamah Agung untuk diangkat menjadi hakim.²⁸

²⁸ Abdullah Sani, *Op.Cit*, hal. 14

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 memuat persyaratan seluruh hakim di semua lingkungan peradilan. Berdasarkan ketentuan pasal 13 ayat (1) UU No.7 Tahun 1989, untuk dapat diangkat menjadi hakim pada Pengadilan Agama, seorang calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Warga negara Indonesia
- b. Beragama Islam
- c. Betaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa
- d. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945
- e. Bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk berkaitan dengan Gerakan Kontra Revolusi G.30.S/PKI, atau organisasi lainnya.
- f. Pegawai negeri
- g. Sarjana syari'ah atau sarjana hukum yang menguasai hukum islam,
- h. Berumur serendah-rendahnya 25 (duapuluh lima tahun).
- i. Berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela.

Seluruh persyaratan hakim merupakan suatu kesatuan yang bersifat kumulatif. Namun demikian, ada persyaratan yang bersifat konkrit dan ada pula yang bersifat abstrak. Syarat-syarat yang bersifat konkrit yaitu kewarganegaraan, agama, bukan anggota organisasi terlarang, pegawai negeri, bidang kesarjanaan dan umur. Hal ini dapat dibuktikan dengan keterangan tertulis yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan syarat lainnya bersifat abstrak, yang sulit untuk diketahui dan diukur secara sederhana.²⁹

4. Cara Hakim Memutuskan Perkara

Cara hakim memutuskan perkara berdasarkan sumber hukum Islam, berdasarkan yang ditegaskan dalam Al- Qur'an surah An-Nisa ayat 59 dan hadist Mu'adz bin Jabal para ahli telah bersepakat bahwa sumber-sumber hukum Islam dalam berbagai kajian bidang dan studi hukum Islam,³⁰ yaitu:

a. Al-Qur'an

Al-qur'an adalah sumber hukum yang paling utama. Di bidang hukum, Al-Qur'an memuat ketentuan-ketentuan hukum formil dan hukum materil. Ketentuan hukum formil yang berkaitan dengan kajian beracara di peradilan agama.

b. Sunnah atau Hadits

Sunnah digunakan sebagai penguat dalil-dalil yang ada di dalam Al-Qur'an dan juga digunakan untuk menentukan hukum yang tidak ada ditegaskan dalam Al-Qur'an.

c. Ijtihad

Pada fuqaha (ahli hukum) telah berijtihad di bidang hukum acara perdata dan peradilan.³¹ Di dalam peradilan dan hukum acara Islam disebutkan ada enam macam unsur peradilan, yaitu:

²⁹ Cik Hasan Basri, *Op.cit*, hal.183

³⁰ Sulaikin Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), hal. 6

³¹ *Ibid.*, hal.9

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Hakim (qadhi)
- 2) Hukum, yaitu putusan hakim yang ditetapkan untuk menyelesaikan suatu perkara
- 3) *Mahkumbih*, ialah suatu yang di haruskan oleh hakim supaya dipenuhi/dilakukan oleh penggugat
- 4) *Mahkum''alaih* (si terhukum), yaitu orang yang dijatuhi hukuman atau yang dimintai untuk memenuhi suatu tuntutan yang dihadapkan kepadanya
- 5) *Mahkumlahu* (pemenang perkara), yaitu yang menggugat suatu hak, yang bertindak atas dirinya sendiri atau dengan perantaraan wakilnya.
- 6) Sumber hukum

Mengenai sumber hukum di sini adalah sebagaimana telah disebutkan, yaitu, Al Qur'an, Sunnah, atau Hadis Rasul dan Ijtihad serta doktrin atau pendapat para ahli, kebiasaan dalam peradilan Islam, Yurisprudensi Pengadilan Agama, dan peraturan perundang-undangan.³²

5. Kode Etik Hakim

Menurut pasal 1 UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana, hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili. Profesi hakim memiliki sistem etika yang mampu menciptakan disiplin tata kerja dan menyediakan

³² Mardani, *Etika Profesi Hukum*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2019), hal. 115.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

garis batas tata nilai sehingga dapat dijadikan pedoman bagi hakim untuk menyelesaikan tugasnya dalam menjalankan fungsi juga mengenai profesinya, serta dijadikan pedoman perilaku keutamaan moral bagi hakim, baik dalam menjalankan fungsi profesi maupun dalam hubungan kemasyarakatan di luar kedinasan.³³

Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial telah mengeluarkan surat keputusan bersama Nomor: 047/KMA/SKB/IV/2009 dan Nomor: 02/SKB/PKY/2009 tentang Kode Etik dan pedoman perilaku hakim yang mengatur perilaku hakim sebagai berikut³⁴ :

a. Berperilaku Adil

Adil bermakna menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan yang menjadi haknya, berdasarkan pada suatu prinsip bahwa semua orang sama kedudukannya di depan hukum.

- 1) Hakim wajib mengerjakan tugas-tugas hukumnya dengan menghormati asas praduga tak bersalah, tanpa mengharapkan imbalan.
- 2) Hakim wajib tidak memihak, baik dalam maupun luar pengadilan dan tetap menjaga, serta menumbuhkan kepercayaan masyarakat pencari keadilan.
- 3) Hakim wajib menghindari hal-hal yang dapat mengakibatkan pencabutan haknya untuk mengadili perkara yang bersangkutan.

³³ *Ibid.*,

³⁴ *Ibid.*,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) Hakim dilarang memberikan kesan bahwa salah satu pihak yang berperkara atau kuasanya termasuk penuntut dan saksi berada dalam posisi yang istimewa untuk memengaruhi hakim yang bersangkutan.
- 5) Hakim dalam menjalankan tugas yudisialnya dilarang menunjukkan rasa suka atau tidak suka, keberpihakan, prasangka, atau pelecehan terhadap suatu ras, jenis kelamin, agama, asal kebangsaan, perbedaan kemampuan fisik atau mental, usia, atau status sosial ekonomi maupun atas dasar kedekatan hubungan dengan pencari keadilan atau pihak-pihak yang terlibat dalam proses peradilan baik melalui perkataan maupun tindakan.
- 6) Hakim dalam suatu proses persidangan wajib meminta kepada semua pihak yang terlibat proses persidangan untuk menerapkan standar perilaku sebagaimana dimaksud dalam butir.
- 7) Hakim dilarang bersikap mengeluarkan perkataan atau melakukan tindakan lain yang dapat menimbulkan kesan memihak, berprasangka, mengancam, atau menyudutkan para pihak atau kuasanya, atau saksi-saksi dan harus pula menerapkan standar perilaku yang sama bagi advokat, penuntut, pegawai pengadilan atau pihak lain yang tunduk pada arahan dan pengawasan hakim yang bersangkutan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Berperilaku Jujur

Kejujuran bermakna dapat dan bernau menyatakan bahwa yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah. Maka seorang hakim dituntut untuk berlaku jujur dengan cara, sebagai berikut:

- 1) Hakim harus berlaku jujur dan menghindari perbuatan yang tercela atau yang dapat menimbulkan kesan tercela.
- 2) Hakim harus memastikan bahwa sikap, tingkah laku dan tindakanya baik di dalam ataupun di luar pengadilan, selalu menjaga serta meningkatkan kepercayaan masyarakat, penegak hukum lain juga para pihak yang berperkara, sehingga tercermin sikap ketidakberpihakan hakim dan lembaga peradilan.
- 3) Pemberian hadiah, hakim dan isterinya tidak boleh menerima atau meminta janji, hadiah, hibah dan lain-lain.³⁵

c. Berperilaku Arif dan Bijaksana

Arif dan bijaksana bermakna mampu bertindak sesuai dengan norma-norma yang hidup dalam masyarakat, baik hukum, keagamaan, kebiasaan-kebiasaan ataupun kesusilaan dengan memperhatikan situasi dan kondisi saat itu serta mampu memperhitungkan akibat dari tindakanya.

- 1) Hakim dalam menjalankan tugas-tugas yudisialnya wajib terbebas dari pengaruh keluarga dan pihak ketiga lainnya.

³⁵ *Ibid.*,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Hakim dilarang mengeluarkan pernyataan kepada masyarakat yang dapat memengaruhi, menghambat dan mengganggu berlangsungnya proses peradilan yang adil, independen, dan tidak memihak.
- 3) Hakim tidak boleh menjabat sebagai pengurus atau anggota partai politik atau secara terbuka menyatakan dukungan terhadap salah satu partai politik.
- 4) Hakim dapat berpartisipasi dalam kegiatan kemasyarakatan dan amal yang tidak memengaruhi sikap netral hakim.³⁶

d. Bersikap Mandiri

Mandiri bermakna mampu bertindak sendiri tanpa bantuan pihak lain, bebas dari campur tangan siapapun dan bebas dari pengaruh apapun.

e. Bertanggung Jawab

Bertanggung jawab bermakna kesediaan untuk untuk melaksanakan sebaik-baiknya segala sesuatu yang menjadi wewenang dan tugasnya, serta memiliki keberanian untuk menanggung segala akibat atas pelaksanaan wewenang dan tugasnya tersebut. Hal ini dapat diterapkan dengan :

- 1) Penggunaan predikat jabatan, hakim dilarang menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi, keluarga dan pihak lain.
- 2) Penggunaan informasi peradilan, hakim dilarang mengungkapkan atau menggunakan informasi yang bersifat rahasia, yang didapat

³⁶ Suhrawardi K.Lubis, *Etika Profesi Hukum*, (Medan: Sinar Grafika, 2008), hal. 28

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam kedudukan sebagai hakim untuk tujuan yang tidak ada hubungannya dengan tugas-tugas peradilan.³⁷

f. Berintegritas Tinggi

Integritas bermakna sikap dan kepribadian yang utuh, berwibawah, jujur dan tidak tergoyahkan. Integritas yang tinggi akan mendorong terbentuknya pribadi yang berani menolak godaan dan segala bentuk intervensi, dengan mengedepankan tuntutan hati nurani untuk menegakan kebenaran dan keadilan.

g. Menjunjung Tinggi Harga Diri

Harga diri bermakna bahwa pada diri manusia melekat martabat dan kehormatan yang harus dipertahankan serta dijunjung tinggi oleh setiap orang. Hakim harus menjaga kewibawaan serta martabat lembaga peradilan dan profesi baik di dalam ataupun di luar pengadilan.

h. Berdisiplin Tinggi

Disiplin bermakna ketaatan kepada norma dan akidah yang diyakini sebagai panggilan luhur untuk mengemban amanah serta kepercayaan masyarakat pencari keadilan. Dalam menerapkan kedisiplinan, seorang hakim harus menerapkan hal-hal berikut ini:

- 1) Hakim berkewajiban mengetahui dan mendalami serta melaksanakan tugas pokok sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya hukum acara, agar dapat menerapkan hukum

³⁷ *Ibid.*,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

secara benar dan dapat memenuhi rasa keadilan bagi setiap pencari keadilan.

- 2) Hakim harus menghormati hak-hak para pihak dalam proses peradilan dan berusaha mewujudkan pemeriksaan perkara secara sederhana, cepat dan biaya ringan.
- 3) Hakim harus membantu para pihak dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.
- 4) Ketua pengadilan atau hakim yang ditunjuk, harus mendistribusikan perkara kepada majelis hakim secara adil dan merata, serta menghindari pendistribusian perkara kepada hakim yang memiliki konflik kepentingan.³⁸

i. Berperilaku Rendah Hati

Rendah hati bermakna kesadaran akan keterbatasan kemampuan diri, jauh dari kesempurnaan dan terhindar dari setiap bentuk keangkuhan.

1) Pengabdian

Hakim harus melaksanakan tugas sebagai pengabdian yang tulus dan menganggap tugas tersebut amanat yang akan di pertanggungjawabkan kepada masyarakat dan Tuhan yang Maha Esa.

³⁸ Mardani, *Op.cit*, hal.119

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2) Popularitas

Hakim tidak boleh bersikap, bertingkah laku atau melakukan tindakan mencari popularitas, pujian, penghargaan dan sanjungan dari siapa pun juga.³⁹

j. Bersikap Profesional

Profesional bermakna suatu sikap moral, dilandasi oleh tekad untuk melaksanakan pekerjaan yang dipilihnya dengan kesungguhan, didukung oleh keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan dan wawasan yang luas.⁴⁰

³⁹ Suhrawardi K.Lubis, *Loc.cit*, hal.30

⁴⁰ Supriadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hal. 20



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Thalak

Thalak dari kata الطلاق artinya melepaskan atau meninggalkan.⁴¹ Dalam istilah syara' thalak adalah

حَلُّ رَابِطَةِ الزَّوْجِ وَ انْهَاءُ الْعَلَاقَةِ الزَّوْجِيَّةِ

Artinya: “Melepaskan tali pernikahan dan mengakhiri hubungan suami isteri”.⁴²

Menurut Al-Jazairi, thalak yaitu :

الطَّلَاقُ إِزَالَةُ النِّكَاحِ أَوْ نَقْصَانُ حَلِّهِ بِلَفْظٍ مَخْصُوصٍ

Artinya: “Thalak ialah menghilangkan ikatan pernikahan atau mengurangi pelepasan ikatan dengan menggunakan kata tertentu”.

Sedangkan menurut Abu Zakaria Al-Anshari, thalak ialah:

حَلُّ عَقْدِ النِّكَاحِ بِلَفْظِ الطَّلَاقِ وَ نَحْوِهِ

Artinya: “Melepaskan tali akad nikah dengan kata thalak dan yang semacamnya”.⁴³

Thalak adalah hak suami, karena dialah yang telah berminat melangsungkan pernikahan, dialah yang berkewajiban memberi nafkah dalam iddah. Di samping itu, laki-laki harus memberi mut'ah dan nafkah iddah. Di samping itu, laki-laki adalah orang yang lebih sabar terhadap sesuatu yang tidak akan tergesa-gesa menjatuhkan thalak apabila marah atau ada kesukaran yang menyimpannya. Sebaliknya, kaum perempuan itu lebih cepat marah, kurang tabah

⁴¹ Sayid Sabiq, Fiqh Sunnah jilid 8, (Kuala Lumpur: Victory Agencie, 2001), hal. 9

⁴² Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Sunnah Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hal. 229

⁴³ *Ibid.*, hal. 230

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

sehingga ia sering cepat-cepat minta cerai hanya karena ada sebab yang sebenarnya sepele atau tidak masuk akal. Karena itulah, maka kaum perempuan tidak diberi hak untuk menjatuhkan thalak.⁴⁴

Islam memberikan hak thalak hanya kepada laki-laki, karena ia yang membiayai kehidupan berumah tangga. Jika ia mau bercerai atau menikah lagi, maka ia perlu biaya lagi yang mungkin jauh lebih banyak.⁴⁵

Jika ikatan antara suami isteri demikian itu kokoh kuatnya, maka tidak sepatutnya dirusakkan dan disepelkan. Setiap usaha untuk menyepelkan hubungan pernikahan dan melemahkannya adalah dibenci oleh islam, karena ia merusakkan kebaikan dan menghilangkan kemaslahatan antara suami isteri.⁴⁶

عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبْغَضَ الْحَالِلِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ الطَّلَاقَ

Artinya: “Dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah s.a.w. Bersabda : “perbuatan halal yang sangat dibenci Allah azza wajalla ialah thalak”.⁴⁷ (HR.Abu Dawud dan Hakim dan dishahkan olehnya)

Siapa saja yang merusakkan hubungan antara suami isteri oleh islam dipandang telah keluar dan tidak punya tempat kehormatan dalam islam.

يَقُولُ الرَّسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ مِنَّا مَنْ خَبَبَ امْرَأَةً عَلَى زَوْجِهَا. {رواه ابوداود والنسائي}

Artinya: “Rasulullah s.a.w. bersabda :”bukan dari golongan kami seseorang yang merusak hubungan seorang perempuan dari suaminya”.⁴⁸ (HR.Abu Dawud dan Nasa’i)

Isteri yang minta cerai tanpa sebab dan alasan yang benar maka diharamkan baginya bua surga.

⁴⁴ Ibid., hal. 250

⁴⁵ Ahsin W. Alhafidz, kamus fiqh, (Jakarta: Amzah, 2013), hal. 219

⁴⁶ Sayid Sabiq, Loc.Cit.,

⁴⁷ Abu Dawud Sulaiman bin Al-Asy’ats As-Sijistani, *Sunan Abu Dawud*, (Beirut, Darul Kitabil Arabi, t.th), Nomor 2180, Juz 2, hal. 220 (Makhtabah Asy-Syamilah)

⁴⁸ Abu Dawud, Ibid., Nomor 2177, Juz 2, hal. 220

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

عَنْ ثَوْبَانَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ طَلَاقًا مِنْ غَيْرِ بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَأْحَةُ الْجَنَّةِ. {رواه الترمذي}

Artinya: "Dari Tsaubna, baha Rasulullah s.a.w. bersavda : "siapapun perempuan yang minta cerai tanpa suatu sebab, maka haram baginya bau surga".⁴⁹ (HR. Tirmidzi)

Dari hadits di atas dapat dipahami bahwa setiap seorang isteri yang meminta cerai kepada suaminya tanpa alasan yang dibenarkan oleh syari'at Islam, maka isteri tersebut tidak akan pernah bisa merasakan baunya surga Allah.

B. Hukumnya

Tentang hukum cerai ini para ulama fiqh berbeda pendapat. Pendapat yang paling benar diantar semua itu yaitu yang mengatakan "terlarang", kecuali karena alasan yang benar. Mereka yang berpendapat begini ialah golongan Hanafi dan Hambali.⁵⁰ Alasannya yaitu

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَعَنَ اللَّهُ كُلَّ ذَوَاقٍ مِطْلَاقٍ

Artinya: "Rasulullah s.a.w. bersabda : "Allah melaknat orang yang suka merasai dan bercerai (maksudnya yaitu suka nikah dan cerai)".⁵¹

Ini disebabkan bercerai itu kufur terhadap nikmat Allah. Sedangkan nikah adalah suatu nikmat dan kufur terhadap nikmat adalah haram. Jadi tidak halal bercerai kecuali karena darurat. Darurat yang membolehkan cerai yaitu bila suami meragukan kebersihan tingkah lakunya isterinya, atau sudah tidak punya cinta dengannya. Sebab soal hati haknya terletak dalam genggamannya Allah. Tetapi jika

⁴⁹ Muhammad bin Isa Abu Isa at-Tirmidzi As-sulami, Jami'u Ashal-Shahih Sunan At-Tirmidzi, (Beirut, Darul ihya' At-Taratsil Arabi), Nomor 1187, Juz 3, hal. 493. (Makhtbah Asy-Syamilah)

⁵⁰ Sayid Sabiq, *Op.Cit.*, hal.11

⁵¹ Sayid Sabiq, Juz 2, hal.242

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak ada alasan apapun, maka bercerai yang demikian berarti kufur terhadap nikmat Allah, berlaku jahat kepada isteri. Maka karena itu dibenci dan terlarang.⁵²

Ulama Hambali (penganut mazhab Hambali) memperinci hukum thalak sebagai berikut:

Thalak adakalanya wajib, kadang-kadang haram, mubah dan kadang-kadang dihukumi sunnah. Misalnya thalak dari hakam perkara syiqaq, yakni perselisihan perselisihan suami isteri yang tidak dapat didamaikan lagi, dan kedua pihak memandang perceraian sebagai jalan terbaik untuk menyelesaikan persengketaan mereka.⁵³

Thalak wajib yaitu thalak yang dijatuhkan oleh pihak hakam (penengah) karena perpecahan antara suami isteri yang sudah berat. Ini jika hakam berpendapat hanya thalaklah jalan satu-satunya menghentikan perpecahan.⁵⁴ Termasuk thalak wajib, yaitu thalak dari orang yang melakukan ila', terhadap isterinya setelah lewat waktu empat bulan. Ini jika hakam berpendapat hanya thalaklah jalan satu-satunya menghentikan perpecahan. Dan yang termasuk juga dari thalak wajib yaitu isteri yang nusyuz serta isteri yang melakukan dosa-dosa besar.

Thalak mubah terjadi hanya apabila diperlukan, misalnya karena isteri sangat jelek atau tidak dapat diharapkan adanya kebaikan dari pihak isteri.⁵⁵

Thalak haram yaitu thalak tanpa alasan. Dia diharamkan karena merugikan bagi suami dan isteri, dan tidak adanya kemashlahatan yang mau

⁵² *Ibid.*,

⁵³ Tihami, Sohari Sahrani, *Op.cit.*, hal. 249

⁵⁴ Sayid Sabiq, *Loc.Cit.*, hal. 12

⁵⁵ Tihami, Sohari Sahrani, *Op.Cit.*, hal. 250

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

diapakai dengan perbuatan thalaknya itu. Jadi thalaknya haram, seperti haramnya merusakkan harta benda. Dan karena sabda Rasulullah s.a.w.

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا ضَرَرَ وَلَا إِضْرَارَ

Artinya: “Rasulullah s.a.w. bersabda : tidak boleh berbuat membahayakan dan tidak boleh membalas dengan bahaya”.

Thalak itu dibenci bila tidak ada suatu alasan yang benar sekalipun Nabi s.a.w. menamakan thalak sebagai perbuatan halal. Karena ia merusakkan pernikahan yang mengandung kebaikan-kebaikan yang dianjurkan oleh Agama. Karena itu thalak seperti ini dibenci.

Thalak sunnah yaitu karena isteri mengabaikan kewajiban-kewajiban kepada Allah seperti shalat dan sebagainya, padahal suami tidak mampu memaksanya agar isteri menjalankan kewajiban-kewajibannya tersebut, atau isteri kurang rasa malunya.⁵⁶

Thalak adalah syari’at pengecualian yang diperbolehkan ketika sangat mendesak. Kita dapat menyerupakan aturan thalak dalam Islam dengan pisau bedah. Jika sang dokter menggunakan pisau itu ditempat yang sesuai maka ia akan menghasilkan yang baik. Namun jika ia buruk dalam penggunaannya maka ia akan membuahkan hasil yang terburuk. Kesalahannya bukan terletak pada pisau bedah itu, tetapi pada cara penggunaannya.⁵⁷

Dalil yang mensyariatkan thalak adalah Al-qur’an, Sunnah, ijmak, dan logika manusia. Allah berfirman dalam Al-Qur’an Surah At-Thalaq ayat1:

⁵⁶ Sayid Sabiq, *Op.Cit.*, hal. 12-13

⁵⁷ Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, (Surakarta: Era Intermedia, 2005), hal. 316

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا.

Artinya: “Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, maka Sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri”. kamu tidak mengetahui barangkali Allah Mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.⁵⁸

Dalam sunnah, Rasulullah bersabda:

إِنَّمَا الطَّلَاقُ لِمَنْ أَخَذَ بِالسَّاقِ

Artinya: “Sesungguhnya thalak itu hak orang yang berkuasa (suami)”.⁵⁹
(HR.Ibnu Majah)

Rasulullah juga bersabda:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبْعَضُ الْحَلَائِلِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ الطَّلَاقُ (رواه ابو داود والحاكم و صححه)

Artinya: “ Dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah s.a.w. Bersabda : “perbuatan halal yang sangat dibenci Allah azza wajalla ialah thalak”. (HR.Abu Dawud dan Hakim dan dishahkan olehnya)

Sedang menurut ijmak, sejak masa Rasulullah Saw. sampai hari ini ijmak ulama telah sepakat tentang diperbolehkannya thalak. Terakhir menurut logika, apabila bahtera rumah tangga telah hancur dan kekekalan hidup bersama menjadi suatu kemustahilan-Allah mensyari’atkan pernikahan karena alasan ini-maka

⁵⁸ Departemen Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahalannya, (Bandung: Diponegoro, 2011), hal. 558

⁵⁹ Muhalammad bin Yazid Abdullah Al-Qozwaini, *Sunan Ibnu Majahal*, (Beirut, Darul Fakar, t.th), Nomor 2081, Juz 2, hal. 672 (Makhtabah Asy-Syamilah)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mempertahankan isteri dalam ikatan pernikahan merupakan suatu hal yang sia-sia.⁶⁰

C. Macam –Macam Thalak

Berdasarkan waktu pengucapan thalak, thalak dibagi kepada dua yaitu thalak sunnah dan thalak bid'iy.

1. Thalak sunnah

Thalak sunnah yaitu thalak yang berjalan sesuai dengan ketentuan agama, yaitu seseorang menthalak perempuan yang telah pernah dicampurinya dengan sekali thalak di masa bersih dan belum ia sentuh kembali selama bersih itu.⁶¹

Maksudnya bahwa thalak yang dibenarkan oleh agama untuk dirujuk kembali ialah sekali cerai kemudian rujuk alau cerai lagi kemudian rujuk lagi. Kemudian apabila seorang suami yang ceraikan isterinya sesudah rujuk yang kedua maka ia boleh memilih antara terus memegang isterinya dengan baik-baik atau melepaskannya dengan baik-baik.⁶²

Muhammad Jawad Mughniyah menjelaskan dalam kitab Al-Mughni dikatakan bahwa yang dimaksud dengan thalak yang berdasarkan sunnah adalah thalak yang sesuai dengan perintah Allah subhanahu wa ta'ala dan perintah rasulnya yaitu menjatuhkan thalak kepada isteri dalam

⁶⁰ *Ibid.*, hal. 317

⁶¹ *Ibid.*, hal. 42

⁶² *Ibid.*,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keadaan suci tanpa dicampuri menjelang ia diceraikan.⁶³ Dikatakan thalak sunnah mempunyai tiga syarat berikut:

- 1) Isteri yang dithalak sudah pernah digauli. Bila isteri yang di jatuhkan thalak belum pernah digauli, tidak termasuk thalak sunnah.
- 2) Isteri dapat segera melakukan iddah suci setelah dithalak. Yaitu isteri dalam keadaan suci dari haid.
- 3) Thalak itu dijatuhkan ketika isteri dalam keadaan suci. Dalam masa suci itu isteri tidak pernah digaulinya.⁶⁴

2. Thalak Bid'iy

Thalak bid'iy yaitu thalak menyalahi ketentuan agama, seperti menthalak tiga kali dengan sekali ucap atau menthalak tiga kali secara terpisah-pisah dalam satu tempat, umpamanya seorang suami berkata : Engkau terthalak, engkau terthalak, engkau terthalak. Atau seorang suami menthalak isterinya dimasa isterinya haid atau nifas atau di masa suci sesudah ia gauli.⁶⁵

Para ulama sepakat thalak bid'iy hukumnya haram, dan pelakunya berdosa. Tetapi jumhur ulama berpendapat thalaknya sah. Mereka ini beralasan sebagai berikut:

- a. Thalak bid'iy tetap termasuk dalam pengertian yang tersebut dalam ayat-ayat thalak pada umumnya.

⁶³ Muhammad Syaifuddin, dan dkk, *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hal. 123

⁶⁴ Tihami, Sohari Sahrani, hal. 237

⁶⁵ Sayid Sabiq, *Op.Cit.*, hal. 44

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Penjelasan terus terang dari Ibnu Umar sewaktu ia menthalak isterinya ketika haid. Lalu Rasulullah saw. menyuruh dia merujuknya. Ini berarti thalaknya dianggap sah.

Segolongan ulama berpendapat⁶⁶ bahwa thalak bid'iy tidak sah. Mereka ini menolak memasukkan thalak bid'iy dalam pengertian thalak pada umumnya, karena thalak bid'iy bukan thalak yang diizinkan oleh Allah bahkan diperintahkan oleh Allah untuk meninggalkannya.⁶⁷ Allah berfirman:

فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ

“...maka thalaklah mereka itu ...(QS. At-Thalaq : 1)

Selanjutnya, dalam kitab tersebut dikatakan pula bahwa yang dimaksud dengan thalak bid'iy ialah seorang laki-laki yang menthalak isterinya ketika dalam keadaan haid atau suci tetapi dicampuri. Kalau dia lakukan juga dalam keadaan seperti itu dia berdosa tetapi thalaknya sah, sebagaimana dikatakan umumnya oleh ulama mazhab. Ibnu Al-Mundzir dan Ibnu Abd Al -Barr bahkan mengatakan, bahwa tidak akan ada yang menentang pendapat para ulama mazhab itu kecuali para pelaku bid'iy dan kesesatan.⁶⁸

Adapun thalak jika ditinjau dari boleh atau tidaknya suami kembali kepada isteri ialah terbagi kepada dua, yaitu thalak raj'i dan thalak ba'in:

⁶⁶ Di antara mereka ini: Ibnu Ula'iyah dari Ulama Salaf, Ibnu Taimiyyah, Ibnu Hazm dan Ibnu Qayyim.

⁶⁷ *Ibid.*, hal. 45

⁶⁸ Muhammad Syaifuddin, dan dkk, *Op.cit.*, hal. 124

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Thalak Raj'i

Thalak raj'i yaitu thalak yang dijatuhkan suami kepada isteri yang telah dicampuri nya. Thalak yang ia jatuhkan bukan sebagai pengganti dari mahar yang dikembalikan dan ia belum pernah menjatuhkan thalak sama sekali.⁶⁹ Disini tidak berbeda antara yang dinyatakan dengan terus terang atau dengan sindiran. Jika thalak kepada isteri yang belum pernah digauli dalam arti sebenarnya atau dithalak sebagai ganti dari mahar yang dikembalikannya, atau dithalak tiga kali, maka thalak seperti ini disebut thalak ba'in. Dalam UU No. 25 tahun 1929 pasal 5 disebutkan: semua thalak disebut raj'i kecuali sesudah thalak tiga, thalak sebelum digauli, thalak sebagai ganti mahar yang dikembalikannya dan lain-lain yang dikatakan ba'in dalam UU ini dan UU No.25 tahun 1920 M.⁷⁰ Dasar dari hukum ini adalah firman Allah dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 229:

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ.

Artinya: "Thalak (yang dapat dirujuk) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika

⁶⁹ Ahsin W. Alhafidz, *Op.Cit.*, hal. 219

⁷⁰ Sayid Sabiq, *Op.Cit.*, hal. 58

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim”.*⁷¹

Maksudnya thalak yang ditetapkan Allah sekali sesudah sekali.

Dan suami berhak merujuk isterinya dengan baik sesudah thalak pertama.

Dan begitu pula ia masih berhak merujuk dengan baik sesudah thalak yang kedua kalinya.

Memegang isteri dengan baik maksudnya: merujuknya, mengawininya lagi dan menggaulinya dengan baik. Hak ini hanya diberikan dalam thalak raj’i.⁷² Allah berfirman dalam Al-Qur’an Surah Al-Baqarah ayat 228:

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُوْثُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَهِنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: “wanita-wanita yang dithalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru’. tidak boleh mereka Menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujuknya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma’ruf. akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.⁷³

⁷¹ Departemen Agama RI, *Op.Cit.*, hal.36

⁷² Sayid Sabiq, *Op.Cit.*, hal. 59

⁷³ Departemen Agama RI, *Loc.Cit.*,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun pengecualian hukum ruju' setelah thalak tiga hal ini ditetapkan Al-Qur'an sebagaimana tercantum di bawah ini :

Thalak tiga berarti telah menjadikan perempuan terpisah sama sekali dan haram nikah dengan bekas suami tersebut. Ia tidak halal menikahi bekas isterinya itu lagi, sebelum perempuan tadi nikah dengan laki-laki lain dengan sebenarnya, bukan tahlil.⁷⁴

Allah berfirman dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 230:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Artinya: “Kemudian jika si suami menthalaknya (sesudah Thalak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga Dia kawin dengan suami yang lain. kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, Maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui”.⁷⁵

Maksudnya, kalau suami telah menthalak tiga kali sesudah thalak dua kali sebelumnya, maka tidak halal bagi suami tersebut menikahi kembali sesudah tiga kali thalak itu, sebelum perempuan bekas isterinya itu nikah dengan laki-laki lain dengan arti sebenarnya. Thalak sebelum bercampur berarti thalak ba'in pula karena perempuan yang dithalak dalam keadaan demikian tidak punya masa iddah. Sedangkan ruju' hanya berlaku

⁷⁴ Lihalat : kawin cinta buta, Sayid Sabiq, Fiqh Sunnah juz 6, hal. 57

⁷⁵ Departemen Agama RI, Loc.Cit.,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam masa iddah saja. Jika masa iddahnya habis, tertutuplah kesempatan ruju'.⁷⁶

Perempuan dithalak sebelum di setubuhi tetapi tinggal berdua-duaan disebut thalak ba'in, dan ia wajib beriddah. Idaahnya itu hanya sebagai penjagaan, bukan untuk kepentingan ruju'. Thalak sebagai ganti mahar yang dikembalikan oleh isterinya, yaitu isteri menebus dirinya agar terlepas diri dari suaminya disebut thalak ba'in. Karena ia telah memberikan hartanya sebagai alat pengganti kerugian. Ini berarti melepaskan diri dari pengayoman. Padahal melepaskan diri seperti hanya ada pada thalak ba'in.⁷⁷

a. Hukum Thalak Raj'i

Thalak raj'i tidak melarang bekas suami berkumpul dengan bekas isterinya, sebab aqad pernikahannya tidak hilang, tidak mengilangkan hak (kepemilikan) dan tidak mempengaruhi hubungannya yang halal (kecuali persetubuhan). Jika iddah telah habis maka ruju' tidak boleh, dan berarti perempuannya berthalak ba'in. Jika masih dalam masa iddah maka thalak maka thalak raj'i tidak melarang suami menggauli isterinya.

Bila salah seorang mati dalam masa iddah ini, yang lain menjadi ahli warisnya dan bekas suaminya tetap wajib memberi nafkah kepadanya. Selama masa iddah ini zhihar, ila dan thalak suaminya berlaku. Bila terjadi kematian atau thalak dalam thalak raj'i maka mahar yang akan dibayar

⁷⁶ Sayid Sabiq, *Op.Cit.*, hal. 60

⁷⁷ *Ibid.*, hal. 61

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

belakangan tidak halal diterima oleh bekas suami. Tetapi halal ia menerima sisa mahar yang belum dibayarkan, bila masa iddahnya habis.⁷⁸

Thalak raj'i mengurangi jumlah thalak yang menjadi hak laki-laki terhadap isterinya. Jika ia telah jatukan thalak pertama berarti tinggal dua kali thalak. Jika ia telah jatuhkan thalak dua kali maka tinggal sekali thalak dan walaupun dia meruju'nya tetap tidak mengakibatkan perubahan hukumnya.⁷⁹ Bahkan kalau ia tetap biarkan berlalu habisnya masa iddah tanpa ruju' dan perempuannya nikah dengan laki-laki lain lalu cerai dan kembali lagi kepada laki-laki pertama, maka ia tetap memiliki hak thalak yang tersisa saja. Suami kedua tidak bisa mengugurkan thalak yang pernah dijatuhkannya oleh suaminya yang pertama.⁸⁰

2. Thalak Ba'in

Thalak ba'in yaitu thalak yang ketiga kalinya, thalak sebelum isteri dikumpuli dan thalak dengan tebusan oleh isteri kepada suaminya. Dalam "Bidayatul Mujtahid", Ibnu Rusyd berkata: "para ulama sepakat, thalak ba'in hanya terjadi dalam thalak sebelum disetubuhi-sebelumnya tidak pernah dithalak – thalak dengan tebusan dari isteri (khulu'), sesuai dengan perbedaan pendapat mereka tentang khulu' ini apakah termasuk thalak atau fasakh. Mereka sepakat bahwa bilangan thalak yang merupakan thalak ba'in yaitu thalak tiga kali dilakukan laki-laki merdeka.

Dalam KUH Perdata Mesir tentang thalak ba'in ini terdapat ketentuan tambahan yaitu thalak karena cacat suami, atau karena pergi tak

⁷⁸ *Ibid.*, hal.62

⁷⁹ *Ibid.*, hal. 63

⁸⁰ *Ibid.*, hal. 66

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tentu rimbanya atau karena dipenjara atau karena membahayakan jiwa isterinya.⁸¹ Macam- macam thalak ba'in:

a. Thalak ba'in sughro

Thalak ba'in sughro , ialah thalak yang menghilangkan hak-hak rujuk dari bekas suaminya, tetapi tidak menghilangkan hak nikah baru kepada isteri bekas isterinya itu.

Yang termasuk dalam thalak ba'in sughro ialah:

- 1) Thalak yang dijatuhkan suami kepada isteri yang belum terjadi dukhul (setubuh).
- 2) Khulu'

Hukum thalak ba'in sughro:

- 1) Hilangnya ikatan nikah antara suami dan isteri.
- 2) Hilangnya hak bergaul bagi suami isteri termasuk berkhawat (menyendiri berdua-duaan).
- 3) Masing-masing tidak saling mewarisi manakala meninggal.
- 4) Bekas isteri dalam masa iddah, berhak tinggal di rumah bekas suaminya dengan berpisah tempat tidur dan mendapat nafkah.
- 5) Rujuk dengan akad dan mahar yang baru.⁸²

Bekas suami berhak untuk kembali kepada isterinya yang terthalak ba'in sughro dengan aqad nikah dan mahar baru selama ia belum nikah dengan laki-laki lain. Jika laki-laki ini telah meruju'nya maka ia berhak atas sisa thalaknya. Jika sebelum ini ia baru

⁸¹ *Ibid.*, hal. 67

⁸² Tihami, Sohari Sahrani., hal. 245-246

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menthalaknya satu kali berarti ia masih memiliki dua kali thalak sesudah ruju'. Tetapi kalau sebelum ini ia sudah dua kali thalak, maka ia hanya berhak sekali thalak lagi.⁸³

- b. Thalak ba'in kubro.

Thalak ba'in kubro hukumnya sama dengan thalak ba'in sugthro, yaitu memutuskan ikatan pernikahan. Tetapi thalak ba'in kubro tidak menghalalkan bekas suami meruju' perempuannya lagi kecuali setelah perempuannya tersebut nikah dengan laki-laki dalam arti nikah yang sebenarnya dan pernah disetubuhi tanpa ada niat nikah tahlil.

Allah berfirman dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 230:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Artinya: "Kemudian jika si suami menthalaknya (sesudah Thalak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga Dia kawin dengan suami yang lain. kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, Maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui".⁸⁴

Ulama telah sepakat, bahwa perempuan yang terthalak ba'in kubro bila nikah dengan laki-laki lain kemudian bercerai lalu nikah lagi dengan bekas suami yang pertama sesudah habis iddahnya, maka mulai lembaran baru, dan laki-laki berhak atas tiga kali thalak. Karena suami

⁸³ Ibid.,

⁸⁴ Departemen Agama RI, Loc.Cit.,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kedua telah menghapuskan lembaran pertama. Jika perempuan tersebut kembali kepada bekas suaminya pertama dengan aqad baru, maka aqad baru ini menimbulkan lembaran baru pula.⁸⁵

Adapun perempuan yang terthalak ba'in sughro, jika menikah dengan laki-laki lain kalau sudah habis iddahnya lalu bercerai dan kembali menikah lagi dengan bekas suaminya yang pertama, maka hukumnya sama dengan perempuan yang terthalak ba'in kubro yaitu berulang kembali lembaran baru dan laki-lakinya berhak atas tiga kali thalak. Demikianlah pendapat Abu Hanifah dan Abu Yusuf.⁸⁶

D. Faktor Putusnya Pernikahan

Menurut kompilasi hukum Islam perceraian merupakan salah satu penyebab putusnya pernikahan. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 318 UU pernikahan, yang mengatur bahwa putusnya pernikahan dapat dikarenakan 3 (tiga) alasan sebagai berikut:

1. Kematian
2. Perceraian
3. Putusan Pengadilan.⁸⁷

Menurut Pasal 114 KHI menyatakan bahwa putusnya pernikahan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena thalak oleh suami atau gugatan perceraian oleh isteri. Selanjutnya menurut Pasal 115 KHI menyatakan bahwa

⁸⁵ Sayid Sabiq, *Op. Cit.*, hal. 68

⁸⁶ Sayid Sabiq., hal. 69

⁸⁷ Arso Sosroatmodjo, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1981), Cet. Ke-3, hal. 94

perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah pengadilan tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Selanjutnya dalam Pasal 116 KHI alasan-alasan terjadinya perceraian pasangan suami isteri dapat disebabkan karena:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, atau lain sebagainya yang sulit disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama, 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah pernikahan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri.
- f. Terjadi perselisihan dan pertengkaran antara suami isteri secara terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya.
- g. Suami melanggar taklik-thalak. Adapun makna taklik-thalak adalah perjanjian yang diucapkan oleh calon mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam akta nikah berupa janji thalak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi di masa yang akan datang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

h. Terjadinya peralihan agama atau murtad oleh salah satu pihak yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.⁸⁸

Alasan perceraian adalah suatu kondisi di mana suami atau isteri mempergunakan sebagai alasan untuk mengakhiri atau memutuskan tali pernikahan mereka. Setidaknya ada empat kemungkinan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga yang dapat memicu timbulnya keinginan untuk memutuskan pernikahan.⁸⁹

1. Terjadinya nusyuz dari pihak isteri

Adapun petunjuk mengenai langkah-langkah menghadapi isteri yang melakukan nusyuz, QS An-Nisa' ayat 34 menjelaskan:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالْصَّالِحَةُ قَبِيْتُ
خَفِظَتْ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ
فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: "Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (isteri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi, Mahabesar".⁹⁰

⁸⁸ Syamsyuhadi Irsyad, *Intruksi Presiden R.I Nomor 1 Tahun 1991 Komilasi Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama, 1999), hal. 56

⁸⁹ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia Edisi Revisi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), Cet ke-2, hal. 214

⁹⁰ Departemen Agama RI, *Op.Cit.*, hal. 84

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ayat di atas menjelaskan bila suami menghadapi isterinya nusyuz maka solusi untuk menghadapinya diberikan 3 alternatif yaitu:

- a. Isteri diberi nasehat dengan cara yang ma'ruf agar ia segera sadar terhadap kekeliruan yang dibuatnya.
- b. Pisah ranjang. Cara ini bermakna agar hukuman psikologis bagi isteri dan dalam kesendirian tersebut ia dapat melakukan koreksi diri terhadap kekeliruannya.
- c. Apabila cara ini tidak berhasil langkah berikutnya adalah memberi hukuman fisik dengan cara memukulnya. Para mufassir menafsirkan dengan memukul yang tidak melukai, atau yang lebih tepat adalah mendidiknya.⁹¹

2. Terjadinya nusyuz dari pihak suami.

Dalam surah An-Nisa' ayat 128 dinyatakan:

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya: "Dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh, maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu memperbaiki (pergaulan dengan isterimu) dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap acuh tak acuh), maka sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan".

Dalam Al-Qur'an dan terjemahannya terdapat keterangan bahwa jalan yang ditempuh apabila suami nusyuz seperti acuh tak acuh, tidak mau

⁹¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia Edisi Revisi, Loc.Cit.*,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

menggauli dan tidak memenuhi kewajiban, maka upaya perdamaian bisa dilakukan dengan cara isteri merelakan haknya dikurangi untuk sementara agar suaminya bersedia kembali kepada isterinya dengan baik.⁹²

3. Terjadinya perselisihan dan percekocokan antara suami dan isteri, yang dalam Al-Qur'an disebut syiqaq.

Dalam hal ini Al-Qur'an dalam surah An-Nisa' ayat 35 memberi petunjuk:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Artinya: “Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sungguh, Allah Mahateliti, Maha Mengenal”.⁹³

Penunjukan hakim dari kedua belah pihak ini diharapkan dapat mengadakan perdamaian dan perbaikan untuk menyelesaikan persengketaan diantara dua belah pihak suami dan isteri. Apabila karena sesuatu hal, hakim yang ditunjuk tidak dapat melaksanakan tugasnya, dicoba lagi dengan menunjuk hakim lainnya. Dalam hal ini, di Indonesia dikenal sebuah badan penasehat perkawinan dan penyelesaian perceraian (BP4) yang tugas dan fungsinya menjalankan tugas hakim (arbitrator) untuk mendamaikan suami-isteri yang bersengketa atau dalam hal-hal tertentu memberi nasehat calon suami dan isteri yang merencanakan perkawinan.⁹⁴

⁹² Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia...*, hal. 215

⁹³ Departemen Agama RI, *Loc. Cit.*, hal.84

⁹⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia...*, 216-217

4. Terjadinya salah satu pihak melakukan perbuatan zina atau fakhisyah, yang menimbulkan saling tuduh menuduh antara keduanya. Cara penyelesaiannya adalah membuktikan tuduhan yang didakwahkan dengan cara li'an. Li'an sesungguhnya telah memasuki gerbang putusnya pernikahan dan bahkan untuk selama-lamanya, karena akibat li'an adalah terjadinya thalak ba'in kubro.⁹⁵

E. Bentuk Bentuk Perceraian

1. Khulu' / Gugatan cerai

a. Pengertian Khulu'.

Gugatan cerai dalam bahasa arab disebut Al-Khulu'. kata Al-Khulu' dengan di dhommahkan huruf kha'nya yang disukunkan huruf lam-nya, berasal dari kata Khulu Al-Saubi, maknanya melepas pakaian.⁹⁶ Khulu secara bahasa berasal dari kata kha-la-'a yang artinya menanggalkan. Sementara itu secara istilah, khulu' ialah perceraian atas permintaan isteri dengan membayar sejumlah uang atau mengembalikan mahar. Khulu' juga dinamakan tebusan karena isteri menebus dirinya dari suaminya dengan mengembalikan mahar yang penuh diterimanya.⁹⁷

Lalu digunakan untuk istilah wanita yang meminta kepada suaminya untuk melepas dirinya dari ikatan pernikahan yang dijelaskan

⁹⁵ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*...., 217

⁹⁶ Nur 'Aisyah Albantany, *Plus Minus Perceraian Wanita dalam Kacamata Islam Menurut Al-quran dan Sunnah*, (Jakarta: PT Serambi Diteribusi, 2014), hal. 47

⁹⁷ Ahsin W. Alhafidz, *Op.Cit.*, hal. 123-124

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Allah SWT sebagai pakaian. Allah berfirman dalam Al-Qur'an Surah Al-baqarah ayat 187:

أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ هُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتُمُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسْجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

Artinya: “Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi ma'af kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan Makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, Yaitu fajar. kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf dalam mesjid. Itulah larangan Allah, Maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa”.⁹⁸

Sedangkan menurut pengertian syari'at, para ulama mengatakan dalam banyak defenisi, yang semuanya kembali kepada pengertian, bahwasanya Al-Khulu' adalah terjadinya perpisahan (perceraian) antara sepasang suami isteri dengan keridhaan dari keduanya dan dengan pembayaran diserahkan isteri kepada suaminya. Adapun Syaikh Al-Bassam berpendapat, Al-Khulu' adalah perceraian suami isteri dengan

⁹⁸ Depertemen Agama RI, *Op.Cit.*, hal. 29

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembayaran yang diambil suami dari isterinya, atau selainnya dengan lafazh yang khusus.⁹⁹

Secara terminologi, khulu' menurut istilah hukum, diartikan dengan: "putus pernikahan dengan menggunakan uang tebusan : menggunakan ucapan thalak atau khulu'." Menurut istilah fiqh, khulu' berarti akad yang dilakukan oleh suami isteri untuk membebaskan isteri dari pernikahan dengan syarat isteri membayarkan sejumlah harta, lalu suami menthalaknya atau mengkhulu'nya, atau diartikan dengan tebusan yang diberikan oleh isteri agar suami menceraikannya.¹⁰⁰

Adapun para ulama' diantaranya Abdurrahman Al-Jaziri memberikan definisi Al-Khulu' menurut masing-masing mazhab diantaranya adalah: Mazhab Hanafi mendefenisikan khulu' ialah menanggalkan ikatan pernikahan yang diterima oleh isteri dengan lafadz khulu' atau yang semakna dengan itu. Mazhab Syafi'i memberikan definisi khulu' menurut syara' adalah lafadz yang menunjukkan perceraian antara suami isteri dengan tebusan yang harus memenuhi persyaratan tertentu. Mazhab Maliki memberikan definisi Khulu' menurut syara' adalah thalak dengan tebusan. Dan Mazhab Hanabilah mendefinisikan khulu' adalah suami menceraikan isterinya dengan tebusan yang diambil oleh suami dari isterinya atau dari lainnya dengan lafadz tertentu.¹⁰¹

⁹⁹ Nur 'Aisyah Albantany, *Op.Cit.*, hal. 47-48

¹⁰⁰ Himatu Rodiah, *Hukum Perceraian Untuk Wanita Islam Berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah*, (Tangerang: Lembar Pustaka Indonesia, 2015), hal. 56

¹⁰¹ *Ibid.*, hal. 57

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kalangan ahli fiqh, khulu' kadang dimaknai umum, yaitu perceraian dengan disertai sejumlah harta sebagai iwadh¹⁰² yang diberikan oleh isteri kepada suami untuk menebus diri agar terlepas dari ikatan pernikahan, baik dengan kata khulu', mubara'ah maupun thalaq. Namun kadang juga dimaknai khusus, yaitu thalak atas dasar iwadh sebagai tebusan dari isteri dengan kata-kata khulu' (pelepasan), atau yang semakna seperti mubara'ah (pembebasan).¹⁰³

Penggunaan kata khulu' untuk putusnya pernikahan karena isteri sebagai pakaian bagi suaminya berusaha menanggalkan pakaian itu dari suaminya. Khulu' mengandung arti bhawa isteri melepaskan pernikahan dengan membayar ganti rugi kepada suami yang berupa pengembalian mahar (maskawin) kepada suami. Peristiwa ini suami melepaskan kekuasaanya sebagai suami dan memberikan kekuasaan tersebut kepada isterinya dalam bentuk thalak tebus.¹⁰⁴

Dari pendapat para ulama tersebut, ada kesamaan dengan pengertian yang tersebut dalam kompilasi hukum Islam (KHI). Dalam kompilasi hukum Islam (KHI) disebutkan bahwa khulu' adalah perceraian yang terjadi atas permintaan isteri dengan memberikan

¹⁰² Dalam kamus fiqh, Iwadh menurut bahasa, artinya pengganti atau tebusan. sementara itu menurut istilah iwadh adalah membayar sejumlah uang untuk menebus status suami karena melanggar taklik thalak yang diucapkan setelah terjadinya akad nikah. apabila seorang suami melanggar ketentuan dalam taklik thalak isteri berhak untuk menebus atau tidak menebusnya. jika isteri menebus dengan membayar iwadh dan diterima oleh Pengadilan Agama berarti telah jatuh thalak suami kepadanya. akan tetapi jika isteri tidak mempermasalahkan pelanggaran taklik thalak itu berarti kehidupan rumah tangga tetap masih berjalan normal.

¹⁰³ *Ibid.*,

¹⁰⁴ Nur 'Aisyah Albantany, *Op.Cit.*, hal. 49

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tebusan atau iwadh kepada dan atas persetujuan suaminya.¹⁰⁵ Dan dalam Pasal 161 disebutkan bahwa Perceraian dengan jalan khulu' mengurangi jumlah thalak dan dan tak dapat dirujuk.¹⁰⁶

Dasar mengenai khulu' adalah firman Allah dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 229:

أَحْلَلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثِ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ هُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتُمُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

Artinya: “Thalak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim ”.¹⁰⁷

Demikin juga dengan hadits yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas semoga Allah meridhai keduanya-bahwa isteri Tsabit bin Qais mendatangi Rasulullah Saw. dan berkata, “wahai Rasulullah,

¹⁰⁵ Ibid., hal. 50.

¹⁰⁶ Syamsyuhadi Irsyad, *Op.Cit.*, hal. 74

¹⁰⁷ Departemen Agama RI, *Op.Cit.*, hal. 36

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sesungguhnya aku tidak mencelanya dalam akhlak dan agama, tetapi aku membenci kekufuran dalam Islam.” Rasulullah bersabda, *Apakah kamu akan mengembalikan kebunnya kepadanya?* Ia menjawab, “Ya.” Rasulullah kemudian berkata kepada Tsabit, *Terimalah kebun (itu) dan thalakhlah ia dengan thalak yang sesungguhnya.*

Sementara itu, ijmak telah sepakat tentang bolehnya khulu’ apabila ada kebutuhan yang mendorong melakukan hal tersebut seperti rumah tangga buruk dan isteri yang benci terhadap suaminya.¹⁰⁸

Khulu’ itu boleh dilakukan dalam waktu haid atau suci, tidak ada ikatan waktu. Karena dalam Al-Qur’an tidak ada keterangan yang menetapkan waktunya secara khusus. Rasulullah s.a.w. juga tidak menetapkan waktu khusus sehubungan dengan khulu’ isteri Tsabit bin Qois. Rasulullah juga tidak bertanya dan membicarakan keadaan isterinya. Padahal soal haid bukan perkara yang jarang terjadinya pada wanita.¹⁰⁹

a. Rukun dan karakteristi khulu’

Abdul Ghofur Anshori menjelaskan bahwa khulu’ memiliki beberapa unsur yang sekaligus rukun serta menjadi karakteristik dari khulu’.

a) Suami yang menceraikan isterinya dengan tebusan.

suami hendaklah seseorang yang ucapannya telah dapat diperhitungkan secara syara’ yaitu akil baligh dan bertindak atas kehendaknya sendiri secara sengaja, dengan kata lain suami dalam

¹⁰⁸ Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, (Surakarta: Era Intermedia, 2005), hal. 408-409

¹⁰⁹ Al- Hamdani, *Risalah Nikah*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), hal. 267

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keadaan gila atau di bawah pengampuan tidak sah melakukan khulu'.

- b) Isteri yang meminta cerai dari suaminya dengan tebusan.

isteri selaku pihak yang mengajukan khulu kepada suaminya disyaratkan memenuhi hal-hal berikut:

- 1) Ia adalah seorang yang berada dalam wilayah si suami, dalam arti isterinya atau yang telah diceraikannya namun masih berada dalam iddah raj'i.
- 2) Dia adalah seorang yang telah dapat bertindak atas harta, karena untuk keperluan pengajuan khulu ini ia harus menyerahkan harta. Untuk saat ini ia harus seseorang yang telah baligh, berakal sehat, tidak berada di bawah pengampuan, dan cakap bertindak atas harta.

Kalau syarat ini tidak dapat dipenuhi, maka yang melakukan khulu adalah walinya. Sedangkan iwadh dibebankan kepada hartanya sendiri, kecuali keinginan datang dari pihak wali. Khulu dapat dilakukan atas kehendak pihak ketiga dengan persetujuan isteri atau yang dikenal dengan khulu ajnabi. pembayaran dalam ini ditanggung oleh pihak ketiga tersebut.¹¹⁰

- b. Akibat hukum khulu'

Khulu' yang memenuhi syarat-syarat dapat mengakibatkan hukum-hukum sebagai berikut:

¹¹⁰ Muhammad Syaifuddin, dan dkk, *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hal.134

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Jatuhnya thalak ba'in. Sebab, isteri tidak memberikan harta melainkan agar dapat membebaskan diri dari suaminya dan itu tidak akan terjadi, kecuali apabila thalak tersebut thalak ba'in .
- 2) Tebusan Khulu' wajib berada dalam tanggungan isteri, baik tebusan berupa uang ataupun lainnya, berupa hal-hal yang bersifat harta, senilai dengan harta, atau berupa manfaat yang dapat ditukar dengan harta, baik tebusan tersebut berupa mahar keseluruhan atau sebagian. Sebab, suami menggantungkan thalak isterinya pada tebusan yang akan diterimanya sementara sang isteri telah rela akan hal itu hingga ia berkewajiban memberikannya.
- 3) Gugurnya hak-hak harta yang ada pada waktu khulu' bagi masing-masing suami isteri dan hal-hal yang berhubungan dengan pernikahan yang diakhiri oleh khulu'. Akibat khulu' tersebut, hak-hak harta yang dimiliki isteri merupakan kewajiban bagi suaminya menjadi gugur. Dan hak-hak suami pun menjadi gugur.¹¹¹

Jumhur ulama termasuk imam mazhab yang empat berpendapat bahwa apabila suami mengkhulu' isterinya, maka isteri memiliki dirinya, ia berhak menentukan nasibnya sendiri dan suami tidak boleh merujuknya, karena si isteri sudah mengeluarkan uang untuk melepaskan diri dari suaminya. Kalau suami diberi kesempatan rujuk, maka tebusan isteri itu tidak ada artinya.

¹¹¹ Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Op.Cit.*, hal. 421

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bahkan seandainya suami mengembalikan tebusan isterinya dan si isteri menerimanya, suami tidak berhak merujuknya selama iddahnya, karena isteri tersebut sudah ba'in (lepas) dari suaminya dengan tebusan itu.¹¹²

- c. Khulu' itu thalak atau fasakh.

Jumhur ulama berpendapat bahwa khulu' adalah thalak ba'in seperti yang diterangkan dalam hadits Abu Zubair:

اقْبَلِ الْحَدِيثَةَ وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً

Artinya: "Ambillah kebunnya dan ceraikanlah dengan thalak satu".¹¹³
(riwayat Bukhari)

Sebagian ulama fiqh lainnya, di antaranya Ahmad bin Hanbal, salah seorang imam mazhab, Dawud bin Ali Al-Ashbihani dari kalangan ulama fiqh, Utsman bin Affan, Ibnu Umar dan Ibnu Abbas dari kalangan sahabat, semuanya berpendapat bahwa khulu' adalah fasakh, bukan thalak.

Ibnu Qoyyim berkata: Dalil yang menunjukkan bahwa khulu' itu bukan thalak ialah bahwasanya Allah menetapkan adanya tiga akibat hukum thalak sesudah dukhul dan belum tiga kali cerai, dan tiga akibat hukum tersebut bertentangan dengan akibat hukum khulu'.

Pertama, suami berhak merujuk isterinya selama dalam iddah.

¹¹² Al-Hamdani., *Op.Cit*, hal. 268

¹¹³ Muhammad bin Ismail Abu Abdullah Al Bukhori Al Ja'fani, *Al Jami'u Shohih Al Mukhtashor*, (Beirut, Daru Ibnu Katsir, 1987), Nomor 4971, Juz 6, hal. 2021 (Makhtabah Asy-Syamilah)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kedua, thalak itu tiga kali, maka tidak halal dinikahi lagi setelah perempuan itu dithalak tiga, kecuali jika sudah nikah lagi dengan laki-laki lain dan sudah dicampuri.

Ketiga, iddahnya tiga kali suci.

Nash dan *ijmak* menetapkan bahwa cerai khulu' tidak ada iddahnya. Hadits Rasulullah s.a.w. serta pendapat para sahabat menetapkan bahwa iddah khulu' hanya satu kali haid. Ada pula *nash* yang memperbolehkan khulu' setelah dua kali thalak, dan thalak yang ketiga dijatuhkan setelah terjadi khulu', ini membuktikan dengan jelas bahwa khulu' bukan thalak.

Perselisihan pendapat ini membawa akibat kepada iddah. Orang yang berpendapat bahwa khulu' itu sama dengan thalak, maka thalaknya adalah thalak ba'in, sedang yang menganggap fasakh, maka thalaknya bukan ba'in. Orang yang menceraikan isterinya sampai dua kali, kemudian mengkhulu'nya, lalu akan merujuknya, maka ia berhak merujuknya meskipun si isteri belum nikah lagi dengan laki-laki lain, karena thalaknya belum sampai tiga kali, khulu'nya tidak mempengaruhi. Mereka yang menganggap khulu' sebagai thalak berpendapat bahwa suami tidak diperkenankan merujuk isterinya sampai ia nikah dengan laki-laki lain, karena dengan adanya khulu' itu thalaknya dianggap genap tiga.¹¹⁴

¹¹⁴ *Ibid.*,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Alasan-alasan syar'i yang membolehkan isteri minta cerai (khulu') dari suaminya.

Di dalam agama Islam, pada dasarnya seorang isteri dilarang minta cerai (khulu') dari suaminya kecuali jika didasari dengan alasan-alasan yang dibenarkan syari'at Islam. Diantara alasan-alasan yang syar'i tersebut sebagai berikut :¹¹⁵

1. Suami murtad (keluar dari agama Islam dan masuk ke agam lain).
2. Suami berbuat kekufuran atau kemusyrikan kepada Allah dengan berbagai macam dan bentuknya. Dan telah ditegaskan hujjah atau disampaikan nasehat kepadanya agar bertaubat darinya tapi tidak mendengar dan menerima.
3. Suami melarang dan menghalangi isteri untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban agama, seperti kewajiban sholat lima waktu, kewajiban zakat, memakai hijab syar'i yang menutupi auratnya, menuntut ilmu syar'i yang hukumnya fardhu 'ain dan sebagainya.
4. Suami memerintahkan dan memaksa isteri berbuat dosa dan maksiat kepada Allah.
5. Suami berakidah dan bermanhaj sesat dan menyesatkan dari agama Allah yang lurus dan haq.
6. Suami bersikap kasar dan keras serta tidak sayang kepada isteri dan akhlaknya buruk.

¹¹⁵ Nur 'Aisyah Albantany, *Op.Cit.*, hal. 89

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Suami menolak dan berpaling dari agama Islam, tidak mau mempelajarinya, dan tidak ta'at dan tunduk terhadap aturan-aturannya.
8. Suami tidak mampu memberikan nafkah wajib bagi isteri, baik nafkah lahir maupun batin.
9. Isteri merasa benci dan sudah tidak nyaman hidup bersama suaminya, bukan karena agama dan akhlak suami yang baik tapi karena khawatir tidak bisa memenuhi hak-haknya.
10. Dan alasan-alasan lainnya yang syar'i.¹¹⁶

Dengan adanya salah satu alasan dari alasan-alasan ini maka sang isteri boleh minta cerai atau khulu' dari suaminya. Tentunya hal ini dilakukan setelah memberikan nasehat kepadanya secara langsung maupun dengan minta bantuan orang lain yang dianggap mampu menasehatinya dan menyingkap kerancuan dan kesehatannya dan juga setelah mempertimbangkan antara sisi maslahat dan mafsadat

2. Zhihar

a. Pengertian zhihar

Zhihar dalam bahasa Arab adalah masdar dari kata *zhahara* yang berasal dari akar kata *azh-zhahr*, yaitu ucapan suami kepada isterinya, "kamu bagiku seperti punggung ibuku". Sementara dalam terminologi fuqaha, zhihar adalah perilaku suami yang menyerupakan isterinya dengan perempuan yang diharamkan baginya secara

¹¹⁶ *Ibid.*, hal. 89

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

permanen, atau dengan salah satu anggota tubuh perempuan itu, yang tidak boleh diperlihatkan olehnya, seperti punggung, perut, dan paha.¹¹⁷

Dalam kitab *Fathul-Bari* dikatakan: khusus disebut punggung saja bukan anggota badan lainnya, karena umumnya punggunglah tempat tunggangan. Karena itu “tempat tunggangan” disebut “punggung”. Lalu perempuan kemudian diserupakan dengan punggung, sebab ia jadi tunggangan laki-laki.¹¹⁸

Pada zaman jahiliyah “zhihar” menjadi thalak. Lalu Islam datang membatalkannya. Kemudian Islam menetapkan isteri yang dizhihar haram digauli sebelum membayar kafarah¹¹⁹ kepada isterinya. Sekalipun suami yang menzhihar isterinya hanya bermaksud untuk menthalaknya saja, tapi secara hukum tetap dipandang zhihar. Dan jika dengan ucapan thalak dimaksud zhihar, tapi secara hukum tetap thalak. Andaikata suami berkata “engkau denganku seperti punggung ibuku”, sedang maksudnya hanya menthalak, maka hukumnya bukan sebagai thalak, tapi zhihar. Dan zhihar tidak menyebabkan isteri terthalak dari suaminya. Para ulama sepakat tentang haramnya zhihar. Dan tidak boleh melakukan perbuatan ini. Karena Allah berfirman dalam Al-Qur’an Surah Al-Mujadalah ayat 2-4:

¹¹⁷ Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Op.Cit.*, hal. 449

¹¹⁸ Sayid Sabiq, *Op.Cit.*, hal. 115-116

¹¹⁹ Dalam Kamus Fiqih Kafarat secara bahasa, kafarat adalah bentuk shighah mubalaghah dari kata kafara yang artinya penutup. sementara itu secara istilah adalah segala bentuk pekerjaan yang dapat menutup dosa sehingga tidak meninggalkan pengaruh yang menyebabkan adanya sanksi baik di dunia maupun di akhirat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مَنْ نَسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتُهُمْ ۚ إِنَّ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا الَّتِي وَلَدْنَاهُمْ ۚ وَأَنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَزُورًا ۚ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوفٌ غَفُورٌ. وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَا ۚ ذَلِكُمْ تُوَعِّظُونَ بِهِ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَا ۚ فَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ فَاِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ۚ ذَٰلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya: “Orang-orang yang menzhihar isterinya di antara kamu, (menganggap isterinya sebagai ibunya, padahal) Tiadalah isteri mereka itu ibu mereka. ibu-ibu mereka tidak lain hanyalah wanita yang melahirkan mereka. dan Sesungguhnya mereka sungguh-sungguh mengucapkan suatu Perkataan mungkar dan dusta. dan Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. orang-orang yang menzhihar isteri mereka, kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan, Maka (wajib atasnya) memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami isteri itu bercampur. Demikianlah yang diajarkan kepada kamu, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Barangsiapa yang tidak mendapatkan (budak), Maka (wajib atasnya) berpuasa dua bulan berturut-turut sebelum keduanya bercampur. Maka siapa yang tidak Kuasa (wajiblah atasnya) memberi Makan enam puluh orang miskin. Demikianlah supaya kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. dan Itulah hukum-hukum Allah, dan bagi orang kafir ada siksaan yang sangat pedih”.¹²⁰

Jumhur ulama berpendapat zihar khusus dengan ucapan ibu, seperti yang tersebut dalam Al-Qur'an. Andaikata suami berkata kepada isterinya: “engkau denganku seperti punggung ibuku”, maka ini

¹²⁰ Departemen Agama RI, *Op.Cit.*, hal.542

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

namanya zhihar. Tetapi kalau ia berkata: engkau denganku seperti punggung saudara perempuanku, maka ini bukanlah zhihar.¹²¹

Karena menurut mereka ini bahwa zhihar berarti seorang suami menyamakan isterinya dengan muhrimnya sedang muhrim itu haram selamanya untuk dinikahi. Muhrim itu adakalanya nasab, pernikahan dan susuan. Jadi sebabnya di sini adalah kemuhriman yang selamanya itu. Dan kalau suami berkata kepada isterinya, bahwa ia seperti saudaraku perempuan atau ibuku, yang dimaksudnya untuk memuji atau mengejeknya, maka namanya bukanlah zhihar. Zhihar hanya boleh oleh suami yang berakal, dewasa lagi muslim dan pernikahannya dilakukan secara sah lagi dikuatkan menurut hukum.¹²²

b. Akibat zhihar.

Apabila seorang suami menzhihar isterinya, dan zhiharnya itu benar, maka timbul beberapa akibat hukum :

- 1) suami haram mencampuri isterinya sebelum ia membayar kafarat.

Suami isteri haram berhubungan kelamin, juga perbuatan-perbuatan yang merangsang ke arah itu, seperti berpelukan berciuman dan sebagainya. Demikian menurut pendapat jumhur ulama.

Sebagian ulama seperti Imam Syafi'i dan Ats-Tsauri berpendapat bahwa yang diharamkan hanya berhubungan kelamin saja, karena

¹²¹ *Ibid.*, hal.121

¹²² *Ibid.*,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

al-masis atau persetubuhan-dalam salah satu *qaulnya*-digunakan sebagai *kinayah* jimak.

- 2) Suami wajib membayar kifarati supaya suami isteri dapat bercampur kembali.¹²³

Al-Qur'an dan As-Sunnah telah menetapkan bagi orang yang telah menzhihar isterinya untuk memerdekakan budak yang kini sudah tidak ada lagi. Jadi tinggal berpuasa dua bulan berturut-turut, atau kalau tidak mampu maka memberi makan enam puluh orang miskin, yang pelaksanaannya bisa dilakukan dengan menjamu mereka sampai kenyang (makan siang dan makan malam), dengan menu sedang yang biasa diberikan kepada keluarga dan anak-anak sendiri sehari-hari.¹²⁴

3. Fasakh

a. Pengertian Fasakh

Fasakh bersal dari bahasa Arab dari akar kata fa-sa-kha yang secara etimologi berarti membatalkan. Bila dihubungkan kata ini dengan pernikahan berarti membatalkan pernikahan atau merusak pernikahan. Dalam arti terminologi ditemukan beberapa rumusan yang hampir sama maksudnya, di antaranya yang terdapat dalam KBBI, berikut: pembatalan ikatan pernikahan oleh Pengadilan Agama berdasarkan tuntutan isteri atau suami yang dapat dibenarkan

¹²³ Al hamdaani, *Op.Cit.*, hal. 283-284

¹²⁴ Anshori Umar, *Muslimah Fiqih Wanita*, Tarjm. Fiqhul Maratul Muslimah, (Semarang: CV. ASY SYIFA', 1986), hal. 429

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengadilan Agama atau karena pernikahan yang telah terlanjur menyalahi hukum pernikahan.¹²⁵

Memfasakh akad nikah berarti membatalkan dan melepaskan ikatan pertalian suami-isteri. Fasakh bisa terjadi karena syarat-syarat yang tidak terpenuhi pada akad nikah atau karena hal-hal lain datang kemudian yang membatalkan kelangsungannya pernikahan.

Contoh fasakh karena syarat-syarat yang tidak terpenuhi dalam akad pernikahan :

- a) Setelah akad nikah ternyata isterinya adalah saudara sesusuan.
- b) Suami-isteri masih kecil diakadkan oleh selain ayah atau datuknya, kemudain setelah dia dewasa maka ia berhak untuk meneruskan ikatan pernikahannya dahulu itu atau mengakhirinya. Khiyar ini disebut khiyar baligh. Jika yang dipilih mengakhiri ikatan suami-isteri, maka hal ini disebut fasakh akad.

Contoh fasakh karena hal-hal mendatang setelah akad:

- a. Bila salah seorang dari suami isteri murtad dari Islam dan tidak mau kembali sama sekali. Maka akadnya fasakh (batal) disebabkan kemurtadan yang terjadi belakangan ini.
- b. Jika suami yang tadinya kafir masuk Islam, tetapi isteri tetap dalam kekafirannya, maka akadnya batal (fasakh).¹²⁶

Adapun pisahnya suami-isteri karena fasakh, maka hal ini tidak mengurangi bilangan thalak, sekalipun terjadi fasakh karena khiyar

¹²⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2009), Cet.Ke-3, hal. 242

¹²⁶ Sayid Sabiq, *Op.Cit.*, hal. 124-125

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

baligh, kemudian keada orang suami-isteri tersebut nikah dengan akad baru lagi, maka suaminya tetap punya kesempatan tiga kali thalak.¹²⁷

Jika kondisi penyebab fasakh jelas, maka tidaklah perlu kepada putusan pengadilan seperti terbukti bahwa antara suami-isteri masih saudara sesusu. Dalam keadaan ini wajib memfasakh akad nikahnya dengan kemauannya sendiri. Jika kondisi penyebab fasakh masih samar-samar, maka perlulah kepada pengadilan, dan bergantung kepada putusan tersebut. Seperti fasakh karena isteri musyrik tidak mau masuk Islam, sedang suaminya telah masuk Islam. Sebab mungkin saja isteri musyrik tersebut mau masuk Islam (setelah ada di pengadilan) sehingga dengan demikian akad nikahnya tidak perlu di fasakh.¹²⁸

c. Akibat Hukum Fasakh

Pisahanya suami isteri akibat fasakh berbeda dengan yang diakibatkan oleh thalak. Adapun fasakh, baik karena hal-hal yang datang belakangan ataupun karena adanya syarat-syarat yang tidak terpenuhi, maka hal itu mengakhiri ikatan pernikahan seketika itu.¹²⁹

Mengenai masa pelaksanaan fasakh, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama. Imam Syafi'i berkata harus menunggu selama tiga hari, sedangkan Imam Malik mengatakan harus menunggu selama satu bulan. Dan Imam Hambali mengatakan harus menunggu selama satu tahun.¹³⁰

¹²⁷ *Ibid.*,

¹²⁸ *Ibid.*, hal. 126

¹²⁹ Tihami, Sihari Sahrani, *Lok.Cit.*, hal. 314

¹³⁰ *Ibid.*, hal. 315

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Semua itu maksudnya adalah selama masa waktu tersebut, laki-laki boleh mengambil keputusan akan bercerai atau memberikan nafkah bila si isteri tidak rela lagi. Kalau isteri mau menunggu dan ia rela dengan ada belanja dari suaminya, maka tidak perlu fasakh, sebab nafkah itu adalah haknya.¹³¹

4. Li'an

a. Pengertian Li'an

Li'an berasal dari kata لعن, artinya: mengutuk. Sedangkan menurut syara', li'an berarti mengutuk diri sendiri, yang bisa dijadikan alasan bagi orang yang terpaksa menuduh isterinya berbuat zina dengan laki-laki lain yang sengaja mengotori tempat tidurnya dan menginjak-injak martabatnya.¹³²

Dalam kasus seperti itu, Allah SWT menegaskan dalam Al-Qur'an Surah An-Nur ayat 6-9:

وَالَّذِينَ يَزْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ. وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ. وَيَدْرُؤُا عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ. وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ .

Artinya: "Dan orang-orang yang menuduh isterinya (berzina), Padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, Maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah, Sesungguhnya Dia adalah Termasuk orang-orang yang benar. Dan (sumpah) yang kelima: bahwa la'nat Allah atasnya, jika Dia Termasuk

¹³¹ Ibid.,

¹³² Anshori Umar, *Op.Cit.*, hal. 441

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*orang-orang yang berdusta. Isterinya itu dihindarkan dari hukuman oleh sumpahnya empat kali atas nama Allah Sesungguhnya suaminya itu benar-benar Termasuk orang-orang yang dusta. Dan (sumpah) yang kelima: bahwa laknat Allah atasnya jika suaminya itu Termasuk orang-orang yang benar”.*¹³³

Li'an dari kata la'n. Sebab suami isteri yang bermula'anah pada ucapan yang kelima kalinya berkata : “sesungguhnya padanya akan jatuh laknat Allah, jika ia tergolong orang yang berbuat dusta”.

Ada orang berkata “li'an” itu berarti menjauhkan “suami isteri yang bermula'anah”. Disebut demikian karena sesudah li'an akan mendapat dosa dan dijauhkan satu sama lain selama-lamanya. Dan jika salah satunya ternyata dusta, maka dialah yang dilaknat oleh Allah.¹³⁴

Li'an ada dua macam:

- 1) Suami menuduh isterinya berzina, tapi ia tak punya empat orang saksi laki-laki yang dapat menguatkan kebenaran tuduhannya itu.
- 2) Suami tidak mengakui kehamilan isterinya sebagai hasil dari benihnya.¹³⁵

Suami yang menuduh isterinya berzina tanpa dapat menghadirkan empat orang saksi bersumpah empat kali, yang menyatakan bahwa ia benar. Dan pada kelima kalinya ia mengucapkan bahwa ia akan dilaknat Allah kalau tuduhannya itu dusta. Lalu isteri yang menyanggah tuduhan tersebut bersumpah pula empat kali bahwa suaminya telah berdusta. Dan pada kelima kalinya ia mengucapkan

¹³³ Departemen Agama, *Op.Cit.*, hal. 350

¹³⁴ Sayid Sabiq, *Loc.Cit.*, hal. 126

¹³⁵ *Ibid.*, hal. 129

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bahwa ia akan dilaknat Allah kalau ternyata ucapannya suaminya itu benar.¹³⁶

Jika suami yang menuduh isterinya berzina meNolak untuk mengucapkan Li'an, maka ia wajib dijatuhi hukuman had.¹³⁷

Jika suami tersebut tidak dapat menghadirkan saksi dan tidak mau mengucapkan li'an maka hukumnya sama dengan orang lain tentang hukuman qadzaf. Jika ia mencabut tuduhan, maka ia wajib dikenai hukuman had. Jika isteri yang menolak mengucapkan li'an maka ia wajib dijatuhi had, demikianlah pendapat Malik dan Syafi'i.¹³⁸

b. Akibat li'an dari segi hukum

Akibat lain yang ditimbulkan karena li'an. Secara hukum adalah:

- a. Had zina gugur
- b. Had zina berlalu
- c. Suami isteri bercerai untuk selamanya
- d. Diterapkan berdasarkan pengakuan suami, bahwa dia tidak mencampurinya.
- e. Bila ada anak setelah pernyataan li'an itu tidak dapat diakui oleh suami sebagai anaknya.

Sebaliknya si isteri dapat menggugurkan hukum had atas dirinya dengan membela li'an suaminya dengan li'annya pula atas suaminya.¹³⁹

Dalam kompilasi hukum Islam Bab XVII pasal 162 dijelaskan bahwa

¹³⁶ Sayid Sabiq, *Loc.Cit.*, hal.126

¹³⁷ *Ibid.*, hal. 134

¹³⁸ *Ibid.*, hal. 135

¹³⁹ Tihami, Sohari Sahrani, *Op.Cit.*, hal. 319

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bilamana li'an terjadi maka pernikahan itu putus untuk selamanya dan anak yang dikandung dinasabkan kepada ibunya sedang suaminya terbebas dari kewajiban memberi nafkah.¹⁴⁰

c. Perceraian li'an fasakh atau thalak.

Menurut riwayat dari Ibnu Abbas dalam kisah mengenai kasus mula'anah (laknt-melaknat) ini:

اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَضَى اَنْ لَا تُؤْتِ وَلَا سُكْنَى مِنْ اَجَلٍ اَنْهُمَا يَتَفَرَّقَانِ مِنْ غَيْرِ طَلَاقٍ وَلَا مُتَوَقِّ عَنْهَا

Artinya: “Bahwa Nabi saw. Telah memutuskan, bahwa wanita itu tidak berhak menerima jaminan makan maupun tempat tinggal (dari suaminya), karena kedua-duanya telah bercerai tanpa thalak maupun ditinggal mati”.¹⁴¹ (H.R. Ahmad dan Abu Daud).

Berdasarkan hadits di atas berarti wanita yang difasakh lewat cara li'an, selama menunggu habisnya iddah tidak berhak lagi menerima nafkah maupun tempat tinggal dari suaminya. Karena nafkah itu berhak diterima oleh wanita selama dalam iddahnya yang diceraikan lewat thalak, bukan lewat fasakh. Dan begitu pula halnya tempat tinggal. Apalagi kalau fasakh itu berupa mula'anah. Dan rupanya hadits inilah yang menjadi dasar dari Undang-Undang yang menyatakan,

¹⁴⁰ Syamsyuhadi Irsyad, *Intruksi Presiden R.I Nomor 1 Tahun 1991 Komilasi Hukum Di Indonesia*, hal. 74

¹⁴¹ Abu Dawud Sulaiman bin Al-Asy'ats As-Sijistani, *Sunan Abu Dawud*, (Beirut, Darul Kitabil Arabi, t.th), Nomor 2258, Juz 4, hal. 244 (Makhtabah Asy-Syamilah)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bahwa perceraian yang terjadi lewat li'an itu fasakh namanya. Dan ini pula yang menjadi pegangan Jumhur Al- Ulama.¹⁴²

5. Ila'

a. Pengertian ila'

Menurut etimologi (bahasa), ila' berarti melarang diri dengan menggunakan sumpah. Sedangkan menurut terminologi (istilah), ila' berarti bersumpah untuk tidak lagi mencampuri isteri.¹⁴³

b. Dasar hukum dari pengaturan ila'.

Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 226-227:

لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَائِهِمْ تَرِيصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ.
وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ.

Artinya: "Kepada orang-orang yang meng-ila' isterinya diberi tangguh empat bulan (lamanya). kemudian jika mereka kembali (kepada isterinya), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) thalak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui".¹⁴⁴

Allah bermaksud menghapuskan hukum yang berlaku pada kebiasaan orang-orang jahiliyah, di mana seorang suami bersumpah untuk tidak mencampuri isterinya selama satu atau dua tahun, bahkan lebih. Kemudian Allah menjadikannya empat bulan saja. Waktu empat bulan yang telah ditetapkan Allah dijadikan sebagai masa penangguhan bagi suami untuk merenungkan diri dan memikirkan, mungkin ia akan

¹⁴² Anshori Umar, *Op.Cit.*, hal. 447

¹⁴³ Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fiqh Wanita Edisi Lengkap*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998), Cet. Ke-1, hal. 488

¹⁴⁴ Departemen Agama, *Loc.Cit.*,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membatalkan sumpahnya dan kembali kepada isterinya atau menthalaknya.¹⁴⁵

Menurut Ibnu Abbas, *ila'* berarti sumpah untuk tidak mencampuri isteri selamanya. Sedangkan Atha' mengatakan: "*Ila'* berarti bersumpah dengan nama Allah untuk tidak mencampuri isteri selama empat bulan atau lebih. Jika tidak diiringi dengan bersumpah, maka bukan disebut sebagai *ila'*". Menurut Ibrahim An-Nakha'i: jika seorang suami bersumpah untuk tidak memurkai, mencelakai, mengharamkan isterinya atau tidak lagi hidup bersama, maka yang demikian itu termasuk *ila'*. Asy-Sya'bani mengatakan : segala macam sumpah yang memisahkan antara suami isteri, maka hal itu termasuk *ila'*.¹⁴⁶

c. Hikmah *ila'*

Allah menentukan batas waktu empat bulan bagi suami yang meng-*ila'* isterinya mengandung hikmah pengajaran bagi suami maupun isteri. Bagi suami yang meng-*ila'* isterinya lalu diwajibkan menjahuihnya selama empat bulan itu menimbulkan kerinduan terhadap isteri, lalu menyesali sikapnya yang sudah lalu, memperbaiki diri sebagai bekal sikap yang lebih baik ketimbang masa-masa sebelumnya. Dalam hal ini jika kemudian suami berbaik kembali kepada isterinya

¹⁴⁵ Syaikh Kamil Muhammad, *Op.Cit.*, hal. 489

¹⁴⁶ *Ibid.*,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diwajibkan membayar kaffarah sumpah karena telah mempergunakan nama Allah untuk keperluan dirinya.¹⁴⁷ Kaffarh sumpah itu berupa:

1. Menjamu/menjamin makan 10 orang miskin.
2. Memberi pakaian kepada 10 orang miskin.
3. Memerdekakan seorang budak.

Kalau tidak melakukan salah satu dari tiga hal tersebut maka kaffarahnya ialah berpuasa selama tiga hari berturut-turut,¹⁴⁸ berdasarkan firman Allah dalam Surah Al-Maidah ayat 89:

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسْكِينٍ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعَمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Artinya: “Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja, Maka kaffarat (melanggar) sumpah itu, ialah memberi Makan sepuluh orang miskin, Yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi pakaian kepada mereka atau memerdekakan seorang budak. barang siapa tidak sanggup melakukan yang demikian, Maka kaffaratnya puasa selama tiga hari. yang demikian itu adalah kaffarat sumpah-sumpahmu bila kamu bersumpah (dan kamu langgar). dan jagalah sumpahmu. Demikianlah Allah menerangkan kepadamu hukum-hukum-Nya agar kamu bersyukur (kepada-Nya)”.¹⁴⁹

¹⁴⁷ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010), Cet. Ke-4, hal. 235

¹⁴⁸ *Ibid.*, hal. 236

¹⁴⁹ Departemen Agama, *Op.Cit.*, hal. 122

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hikmah diberlakukannya masa empat bulan mempunyai beberapa hikmah:

1. Dalam masa empat bulan memungkinkan jiwa untuk mengembalikan diri dari menggauli isteri. Begitu juga sang isteri, dia tidak mampu lagi untuk bertahan lebih dari masa itu dalam menggauli suami.
2. Dalam masa itu ada kesempatan untuk menjaga kehormatan diri. Lebih dari masa itu mungkin saja keduanya tidak lagi mampu menjaga kehormatannya inilah hikmah yang tegas.¹⁵⁰

¹⁵⁰ *Ibid.*, hal. 238



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan atas apa yang telah dipaparkan secara komprehensif tentang hal-hal yang berhubungan dengan penelitian, maka selanjutnya peneliti akan memberikan kesimpulan sebagai hasil akhir bahwa:

1. Ada beberapa hal yang menjadi penyebab semakin meningkatnya perceraian PNS di Pengadilan Agama Bangkinang Kelas 1B:

- 1) Tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga.
- 2) rumah tangga telah pecah.
- 3) Tidak adanya tanggung jawab suami terhadap isteri

Dan beberapa hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Ekonomi.
- b. Perselingkuhan atau gangguan orang ketiga.
- c. Pertengkaran, perselisihan dan KDRT.
- d. Meninggalkan salah satu pasangan tanpa alasan.
- e. Tidak adanya kejujuran, keterbukaan dalam hal keuangan.

2. Tinjauan hukum islam terhadap fktor cerai gugat PNS di Pengadilan Agama Bangkinang Kelas 1B.

Dalam hukum Islam di Indonesia jika penyebab perceraian tidak ada pertengkaran dan tergugat melanggar taklik thalak maka akan di putus thalak satu *khul'i*, dengan penggugat membayar *iwadh* (pengganti) 10.000 (sepuluh

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

ribu rupiah), namun jika perceraian itu disebabkan karena pertengkaran dan perselisihan terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup dalam rumah tangga maka dalam putusanya hakim akan memutus thalak satu *bain sughro*.

Imam Malik, Imam Syafii dan Imam Ahmad berpendapat bahwa hakim boleh memutus perceraian dengan alasan tidak diberikannya nafkah oleh suami. Jika kepergian suami, dan keberadaan suami tidak jelas menurut imam Malik dan imam Ahmad boleh dijadikan sebagai alasan perceraian dan hakim bisa menjadikan alasan untuk memutus perceraian tersebut.

Batasan waktu suami meninggalkan isteri menurut imam Malik adalah tiga tahun dan menurut imam Ahmad adalah 6 bulan dan jika suami di penjara maka isteri boleh mengajukan gugat cerai kepada hakim hal ini sesuai dengan pendapat imam Malik yang mengatakan bahwa perceraian tersebut dijatuhi thalak *bain* oleh hakim namun menurut Imam Ahmad perceraian tersebut dijatuhi *fasakh*.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian, maka penulis merekomendasikan berupa saran-saran sebagai berikut:

1. Pernikahan dibutuhkan sikap saling menghargai antara suami isteri, masing-masing suami dan isteri tau akan hak dan kewajiban masing-masing, saling tolong menolong, menutupi kekurangan masing-masing, keterbukaan antara suami dan isteri, saling memahami, menjaga komunikasi antara suami dan isteri.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Kepada para mahasiswa atau para PNS yang belum menikah, hendaknya berpikir lebih matang sebelum melangkah atau mengambil keputusan, karena segala apa yang diputuskan akan mempunyai konsekuensi-konsekuensi logis yang harus dilaksanakan juga. Dan tidak hanya sekedar menuruti keinginan hawa nafsu.





DAFTAR PUSTAKA

- ‘Uwaidah, Syaikh Kamil Muhammad, *Fiqh Wanita Edisi Lengkap*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998
- Ahsin W. Alhafidz, *kamus fiqh*, Jakarta : Amzah, 2013.
- Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, Jakarta: Pustaka Amani, 2002
- Al-Ja’fani, Muhammad bin Ismail Abu Abdullah Al Bukhori, *Al Jami’u Shohih Al Mukhtashor*, Beirut, Daru Ibnu Katsir, 1987, Juz 6, (Makhtabah Asy-Syamilah)
- Albantany, Nur ‘aisyah, *Plus Minus Perceraian Wanita dalam Kacamata Islam menurut Al quran dan Sunnah*, jakarta : PT. Serambi Diterbit, 2014
- Ali, Zainudin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2013, Cet. Ke-4.
- AlQozwaini, Muhammad bin Yazid Abdullah *Sunan Ibnu Majah*, Beirut: Darul Fakar, th.t, Juz 2, (Makhtabah Asy-Syamilah)
- Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Basri, Cik Hasan, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1996.
- Darmawati, *Kewenangan Peradilan Agama*, Jambi: Sulthan Thata Press, 2010.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, Bandung: Diponegoro, 2011.
- Djalil, Basiq, *Peradilan Islam*, Jakarta : Amzah, 2009.
- Emzir, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2010.
- Farida, Ani, dkk, *Perempuan dalam Sistem Perkawinan dan Perceraian di Berbagai Komunitas Adat*, Jakarta: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Jakarta, 2007
- Ghozali, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hartini, Sri, dkk., *Hukum Kepegawaian di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

<http://www.pa-bangkinang.go.id/> (diakses: senin oktober 2020)

Irsyad, Syamsyuhadi, *Intruksi Presiden R.I Nomor 1 Tahun 1991 Komilasi Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama, 1999.

Lubis, Suhrawardi K, *Etika Profesi Hukum*, Medan: Sinar Grafika, 2008.

Lubis, Sulaikin, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005.

MagoNo, *Asas Keadilan Kemanfaatan dan Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2019.

M.Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syariah Di Indonesia*, Jakarta : Prenada Media cet ke-1

Mardani, *Etika Profesi Hukum*, Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2019.

Mas, Marwan, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.

Mathlub, Abdul Majid Mahmud, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, Surakarta: Era Intermedia, 2005

Nurbani, Salim dan Erlies Septiana, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis Dan Disetasi*, Cet Ke-1, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Rismiyati, "Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Putusanya bagi Pegawai Negei Sipil di Pengadilan Agama Yogyakarta" skripsi sarjana al-Ahwal asy-Syakhhiyyah, Fakultas Syariah, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2010.

Rodiah, Himatu, *Hukum Perceraian Untuk Wanita Islam Berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah*, Tangerang: Lembar Pustaka Indonesia, 2015

Rofiq, Ahmad, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia Edisi Revisi*, Cet ke-2 Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2015.

Sabiq, Sayid, *Fiqh Sunnah jilid 8*, Kuala Lumpur : Victory Agencie, 2001.

Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Sani, Abdullah, *Hakim dan Keadilan Hukum*, Jakarta: Bulan Bintang Jakarta, 1977.
- Sohari Sahrani, Tihami, *Fikih Sunnah Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta : Rajawali Pers, 2014.
- Sosroatmodjo, Arso, *Hukum Perkawinan Di Indoesia*, Cet ke-3, Jakarta: Bulan Bintang, 1981.
- SudarsoNo, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta: PT. Rineke Cipta, 1991
- SugioNo, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif , dan R&D*, Bandung : Alfabeta, 2013
- Supriadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Syaifuddin, Muhammad, dkk, *Hukum Perceraian*, Jakarta : Sinar Grafika, 2013.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat Dan Undang-UndangPerkawinan*, Jakarta: Prenada Media Group, 2009.
- Tutik, Titik Triwulan, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana, 2010
- Umar, Anshori, *Muslimah Fiqih Wanita, Tarjm. Fiqhul Maratul Muslimah*, Semarang ; CV. ASY SYIFA', 1986



Surat Keputusan Hakim

Perkara Nomor 0153/Pdt.G/2019/PA.Bkn perkara cerai gugat antara XXXX dengan XXXX yang dimohonkan pada tanggal 08 Februari 2019 yang diketahui oleh hakim. Drs. Samsul Amri, S.H.,M.H., dan anggota hakim Dra. Ermida Yustri, M.HI dan H. Syofyan Nasution, SH. Memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan absolut Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Bangkinang berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, keterangan Penggugat dipersidangan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Kampar yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Bangkinang yang tidak ada bantahan dari Tergugat oleh karenanya gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana pada pasal 4 ayat (1) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 revisi atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah mendamaikan kedua belah pihak, namun usaha tersebut tidak berhasil dan untuk memenuhi ketentuan pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah dilakukan mediasi dalam perkara ini dengan mediator Drs. Nursolihin, MH., namun mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa yang menjadi alasan cerai gugat Penggugat adalah karena antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi, alasan tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam karenanya secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian dimana adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi berdasarkan pasal 39 ayat (2) undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, perceraian harus ada alasan antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun dan harmonis dan alasan tersebut harus dibuktikan untuk menghindari adanya kebohongan dan permainan dalam perkara perceraian;



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa alat bukti surat dan 2 orang saksi yang selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa surat bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim di persidangan dan ternyata cocok, dengan demikian surat-surat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil untuk dinilai sebagai alat bukti, sedangkan secara materil surat-surat bukti tersebut dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah bukti tertulis berupa fotokopi kutipan Akta Nikah 127/09/VII/2009 tanggal 10 Juli 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangkinang, maka harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, dengan demikian telah berdasarkan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai pihak-pihak yang berkepentingan langsung dalam perkara ini (*Persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah, maka secara formil ke 2 (dua) orang saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti saksi, dan secara materil akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan telah memberikan keterangan yang isinya tidak bertentangan satu sama lainnya dan membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua mengetahui akan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, serta sejak sekitar 2 (dua) tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat materiil, maka kesaksian tersebut dapat diterima sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 308 Ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dalam hal adanya perpisahan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dan hal-hal yang menyebabkan perpisahan itu terjadi yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang pada intinya menjelaskan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal satu sama lain selama 2 (dua) tahun, sementara Majelis Hakim juga telah berupaya menasihati Penggugat agar tetap sabar menunggu perbaikan dari Tergugat, namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat yang menunjukkan Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan:

- a. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah, dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri;
- b. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, terjadi pisah tempat tinggal satu sama lain selama 2 (dua) tahun;



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (broken marriage) dan dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 Nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam Al Quran surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi dan juga ketentuan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dinyatakan tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dengan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar Norma agama dan Norma hukum



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berdasarkan pendapat pakar hukum Islam, yaitu Imam Ash-Shuyuti dalam kitab Al-Ashbah wa Al-Nazhair yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan hukum menegaskan sebagai berikut:

درء المفسد أولى من جلب المصالح
فإذا تعارض مفسدة ومصلحة قدم دفع المفسدة غالباً

Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengejar kemashlahatan (yang belum jelas). Apabila berlawanan antara satu mafsadat dengan mashlahat, maka yang didahulukan adalah mencegah mafsadatnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim sepakat dalam musyawarah majelis yaitu gugatan cerai Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dengan didasarkan kepada ketentuan Hukum Islam sejalan dengan bunyi pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat thalak yang patut terjadi adalah thalak bain shugro dari Tergugat atas diri Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

perkara Nomor 366/Pdt.G/2020/PA.Bkn perkara cerai gugat antara XXXX dengan XXXX yang dimohonkan pada tanggal 02 juni 2020 yang diketuai oleh hakim Drs. H. Abdul Rahim, M.H. dan anggotanya Mulyas, S.Ag., M.H dan Husnimar, S.Ag., M.H, memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, panggilan kepada Penggugat dan Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 1 angka 11 dan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa Penggugat yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memenuhi tuntutan Pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk memperoleh surat izin perceraian dengan mengajukan secara tertulis kepada atasannya;

Menimbang, bahwa faktanya sejak perkara ini diperiksa Penggugat telah melampirkan surat izin yang dimaksud dari atasannya. Oleh karena itu, menurut Majelis Hakim dengan adanya surat tersebut maka Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil telah melaksanakan maksud pasal di atas, sehingga perkara *a quo* dapat dilanjutkan tanpa meneliti lebih jauh proses keluarnya surat tersebut, apakah sesuai prosedural atau tidak. Pengadilan bersifat pasif terhadap proses keluarnya surat izin tersebut dan dapat melanjutkan pemeriksaan sepanjang pihak Penggugat menyatakan telah cukup dengan surat izin perceraian yang diajukannya dan terhadap hal ini Penggugat telah menyatakan secara tegas di persidangan untuk tetap melanjutkan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan ternyata bahwa tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek (tanpa hadirnya Tergugat);

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek), hal ini senada dengan pendapat ahli fiqh yang berbunyi;

من دعى الى حكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: *"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya"* Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Edisi Revisi 2014, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, hal ini senada dengan pendapat ahli fiqih yang berbunyi:

إن تعزز بتعزز أو توارى أو غيبة جاز إثباته بالبينة

Artinya: (Apabila Tergugat membangkang atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat tinggalnya, maka Hakim boleh menjatuhkan putusan berdasarkan bukti). Al-Anwar Juz II Halaman 55.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai bahwa Penggugat dan Tergugat adalah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

suami isteri, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. jika dihubungkan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1282 K/Sip/1979, tanggal 20 Desember 1979 yang mengandung kaidah hukum bahwa pendengaran ibu kandung dan pembantu rumah tangga sebagai saksi dalam persidangan dapat diterima, karena dalam gugat perceraian mereka yang paling dekat yang dapat memberikan keterangan yang mendekati kebenaran. Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun saksi yang dihadirkan oleh Penggugat adalah saudara sepupu dan temannya, namun Majelis Hakim dapat menerimanya karena merupakan orang-orang yang paling dekat hubungannya yang dapat memberikan keterangan yang mendekati kebenaran;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai posita angka 3, 4 dan 5, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 307 dan Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai posita angka 3, 4 dan 5, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 307 dan Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa disamping itu terhadap keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan yang mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 309 R.Bg.:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P serta Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 059/04/II/2006 tanggal 01 Februari 2006 dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Sidempuan Utara Kota Padang Sidempuan Propinsi Sumatera Utara;
2. Bahwa sejak 5 tahun setelah pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat jarang pulang, jika ditanya Tergugat marah-marah, egois, keras kepala, jarang pulang bahkan pulang sesuka hatinya;

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Bahwa pada bulan Mei 2016 setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat pergi meninggalkan kediaman besama, sampai saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 4 (empat) tahun, dan sejak saat tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah tinggal bersama lagi dan sudah tidak ada saling mempedulikan lagi;

4. Bahwa upaya yang dilakukan untuk mendamaikan pihak berperkara, melalui Majelis di persidangan ternyata tidak berhasil menyatukan Penggugat dan Tergugat kembali;

5. Bahwa Penggugat sampai pada tahap kesimpulan masih tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Penggugat adalah suami isteri yang sah yang telah menikah pada tanggal 01 Februari 2006 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Sidimpuan Utara Kota Padang Sidimpuan Propinsi Sumatera Utara;
2. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah pecah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sukar untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan petitum Penggugat;

Menimbang, bahwa berhubung petitum Penggugat terdapat beberapa point, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu-persatu;

Menimbang, bahwa atas petitum Penggugat pada point 1 (satu), Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menimbang, bahwa petitum Penggugat pada point 1 adalah supaya Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, namun karena Petitum Penggugat terdapat beberapa point, maka Majelis Hakim akan menjawabnya setelah mempertimbangkan seluruh petitum Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat pada point 2, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa fakta-fakta hukum tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, yaitu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*onheerbaare tweespalt*), selain itu saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa mengenai siapa yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dalam hal ini Majelis juga sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang mengandung abstraksi hukum bahwa tidak perlu lagi mempertimbangkan siapa yang menyebabkan timbulnya perselisihan tersebut, melainkan ditekankan pada keadaan itu sendiri, apakah telah pecah/retak dan sulit dipertahankan dan jika Hakim telah yakin pecahnya hati kedua belah pihak yang berperkara yang menyebabkan pecahnya rumah tangga



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mereka, maka berarti telah terpenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *jo* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan ketentuan Hukum Islam di dalam Kitab *At-Tolak Fi Syari'atil Islamiyah Wal Qanun* halaman 40 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, berbunyi sebagai berikut:

إِنَّ سَبَبَهُ الْحَاجَةُ إِلَى الْخُلَاصِ عِنْدَ تَبَايُنِ الْأَخْلَاقِ وَعَرُوضِ الْبَغْضَاءِ لِمَوْجِبَةِ عِلْمِ
إِقَامَةِ حُدُودِ اللَّهِ

Artinya: bahwa sebab-sebab dibolehkannya perceraian adalah adanya hajat untuk melepaskan ikatan perkawinan, ketika terjadi pertentangan akhlak dan timbulnya rasa benci di antara suami-isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum-hukum Allah SWT;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Majelis berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan yang akan membawa mudharat kepada kehidupan Penggugat dan Tergugat apabila rumah tangga tetap dipertahankan, sedangkan kemudharatan harus disingkirkan sebagaimana kaidah fiqhiyah yang berbunyi sebagai berikut:

الضرر يزال
Artinya: Kemudharatan harus disingkirkan.

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan dalil/hujah syar'iyah dari Kitab *Ghayatul Maram* hal. 162 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

واذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقاً (غاية المرام)

Artinya: Dan apabila ketidak-sukaan isteri terhadap suaminya sudah sedemikian memuncak, maka Hakim boleh menjatuhkan thalak suaminya dengan thalak satu.

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan setiap pasangan suami isteri, justru sebaliknya mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

فإذا تعارض مفسدة ومصلحة قدم دفع المفسدة غالباً

Artinya : Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengejar kemashlahatan (yang belum jelas). Apabila berlawanan antara satu mafsadat dengan mashlahat, maka yang didahulukan adalah mencegah mafsadatnya.]. As Suyuthi , al-Asybah Wa al-Nazhair, hal; 62/17

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dengan meneruskan rumah tangga yang sudah tidak harmonis hanya akan membuat salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak dalam keadaan teraniaya (*dzulm*), maka hal



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut merupakan bukti adanya kemudhoratan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka sudah sepatutnya kemadhoratan tersebut dihilangkan. Terkait hal tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Madza Hurriyat Azzaujaini Fii Athalaq*, Juz 1, halaman 83 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri, yang berbunyi sebagai berikut:

وقد اختار الاسلام نظام للطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزواج صورة من غير روح لان الاستمرار معناه ان يحكم على احد الزوجين لسجن للمؤبد وهذا ظلم ه روح العدالة

Artinya: *Islam memilih lembaga thalak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengambil alih pendapat Dr. Musthafa As Siba'i dalam Kitab *Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun* halaman 100 yang artinya sebagai berikut "Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah SWT menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian”.

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *Imsak bil Ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *Tasrih bi Ihsan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam apabila telah cukup jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri, maka perceraian dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis menyimpulkan harus dinyatakan Tergugat tidak hadir sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R.bg dan telah terbukti rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun, dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi maksud ketentuan 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat pada petitum angka 2 (dua) dalam surat gugatannya dapat dikabulkan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka dan 2 (dua) dalam surat gugatan Penggugat, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 119 ayat 2 huruf a Kompilasi Hukum Islam thalak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah thalak satu ba'in sughra;

Menimbang, bahwa hal tersebut telah relevan dengan pendapat ahli Hukum Islam As-Sayid Sabiq, dalam kitabnya *Fiqh As-Sunah*, Jilid II, halaman 248 yang diambil oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri yang menyatakan sebagai berikut:

فإذا ثبتت دعوها لدى القاضي بينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً
ثناً

Artinya: Jika gugatan isteri menurut hakim telah kuat dengan bukti atau dengan pengakuan suami, sementara perbuatan menyakiti termasuk penyebab tidak langgengnya rumah tangga antara keduanya, di samping itu hakim juga sudah tidak bisa mendamaikan keduanya maka hakim memutuskan ikatan perkawinan keduanya dengan thalak satu bain (sughra).

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan perceraian tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat pada point 3, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis*, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan seluruh petitum Penggugat dan tidak ada petitum Penggugat yang tidak diterima dan oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka atas Petitum Penggugat pada point 1, Majelis Hakim dapat mengabulkannya secara verstek;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;



PEDOMAN WAWANCARA

1. Apa saja faktor perceraian secara umum yang terjadi di Pengadilan Agama ini?
2. Apakah dalam tiga tahun terakhir ini cerai gugat semakin meningkat? Dan bagaimana cerai gugat bagi kalangan PNS?
3. Faktor apa saja yang banyak bagi penggugat PNS mengajukan cerai gugat apakah dari konflik rumah tangga, faktor anak, ekonomi, atau karir jabatan?
4. Apa yang menjadi alasan bagi hakim untuk mengabulkan gugatan PNS tersebut?
5. Apa pedoman bagi hakim dalam mengabulkan gugatan PNS tersebut? apakah berdasarkan Undang-undang atau Hukum Islam?
6. Apa perbedaan antara khulu' dengan cerai gugat ?
7. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap seorang isteri yang mengajukan cerai gugat kepada suaminya?
8. Bagaimana upaya hakim dalam meminimalisir cerai gugat tersebut?
9. Bagaimana pendapat bapak/ibu hakim dalam menerima dan memutuskan cerai gugat yang diajukan oleh isteri kepada suami karna pendapatan seorang isteri lebih besar dari pada pendapatan suami?
10. Apakah ada Iddah nafkah bagi seorang isteri terhadap suami dalam cerai gugat?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara bersama Ibu Hakim Elidasniwati dan Bapak Ridho Setiawan pada tanggal 16 april 2021 di Pengadilan Agama Bangkinang pukul 11:17



Wawancara dengan Ibu Hakim Husnimar pada Tanggal 16 Bulan April 2021 di Pengadilan Agama Babgkinang pukul 12:16



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **"FAKTOR CERAI GUGAT PEGAWAI NEGERI SIPIL PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA BANGKINANG KELAS 1B)"**, yang ditulis oleh:

Nama : **INSINUR SAPUTRI**
NIM : **1172120125**
Program Studi : **Hukum Keluarga**

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 21 Juni 2021
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Wahidin, M.Ag

Sekretaris
Haniah Lubis, ME.Sy

Penguji I
Dr. M. Ihsan, M.Ag

Penguji II
Dr. H. Akmal Abdul Munir, LC, MA

Mengetahui :
Kepala Bagian Akademik Kemahasiswaan dan Alumni
Fakultas Syariah dan Hukum

Jalinus, S.Ag
NIP. 19750801 200701 1 023



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARIAH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. 0761-561645
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

PENGESAHAN PERBAIKAN SEMINAR PROPOSAL
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

Proposal dengan judul **Faktor Cerai Gugat Pegawai Negeri Sipil Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Bangkinang Kelas 1B)** ditulis oleh saudara :

Nama : Insinur Saputri
NIM : 11721201125
Program Studi : Hukum Keluarga
Diseminarkan pada :
Hari / Tanggal : 18 September 2020
Narasumber : Dr. H. Maghfirah, M.A

Telah diperbaiki sesuai dengan saran narasumber seminar proposal mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Kepala Sub. Bagian Akademik

Jalinus, S.Ag.

NIP. 19750801 200701 1 023

Pekanbaru, 04 Februari 2021
Narasumber

Dr. H. Maghfirah, M.A

NIP. 19741025 200312 1 002

UIN SUSKA RIAU

ciptamilik UIN Suska Riau

Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM**

**كلية الشريعة و القانون
FACULTY OF SYARI'AH AND LAW**

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor
Sifat
Lamp.
Hal

Un.04/F.I/PP.01.1/1701/2021

Pekanbaru, 05 Februari 2021

Penting

Pembimbing Skripsi

Kepada

Yth. H. Akmal Munir, Lc., MA

Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru

Assalamu'alaikum warhmatullahi wabarakatuh

Bersama ini kami minta kesediaan Saudara untuk membimbing mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dalam menyusun Skripsi :

Nama : INSINUR SAPUTRI

NIM : 11721201125

Jurusan : Hukum Keluarga (Akhwal Syaksyah) S1

Kepada Saudara diharapkan membimbing metodologi dan materi skripsi. Sebagai bahannya kami kirimkan proposal penelitian dimaksud dengan judul : "Faktor Cerai Gugat Pegawai Negeri Sipil Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Pengadilan Agama Bangkinang Kelas 1B)"

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Dekan

Wakil Dekan I



Dr. Drs. Heri Sunandar, Mcl

NIP. 19660803 199303 1 004

Tembusan:

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Disetujui dan Dikukuhkan

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM**

**كلية الشريعة و القانون
FACULTY OF SYARI'AH AND LAW**

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/1703/2021
Sifat : Biasa
Lamp. : 1 (Satu) Proposal
Hal : **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 05 Februari 2021

Kepada
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama	: INSINUR SAPUTRI
NIM	: 11721201125
Jurusan	: Hukum Keluarga (Akhwal Syaksyah) S1
Semester	: VIII (Delapan)
Lokasi	: Pengadilan Agama Bangkinang Kelas 1B

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul : Faktor Cerai Gugat Pegawai Negeri Sipil Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Pengadilan Agama Bangkinang Kelas 1B).

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksanya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor
Dekan

Dr. Drs. H. Hajar., M.Ag
NIP. 19580712 198603 1 005

Tembusan
Rektor UIN Suska Riau



PENGADILAN AGAMA BANGKINANG KELAS 1B
JL.JEND. SUDIRMAN Nomor : 99 TELP (0762) 20176
WEBSITE : <http://www.pa-bangkinang.go.id> Email: pa.bangkinang@yahoo.com
BANGKINANG 28412

REKOMENDASI

Nomor : W4-A3/ 630 /OT.00/3/2021

Tentang

PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/ PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

Ketua Pengadilan Agama Bangkinang Kelas 1B setelah membaca Surat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar Nomor : 070/BKBP/2021/80 tanggal 04 Februari 2021, dengan ini memberi Rekomendasi/ Izin Penelitian kepada :

- | | |
|------------------|--|
| 1. Nama | : INSINUR SAPUTRI |
| 2. NIM | : 11721201125 |
| 3. Program Studi | : HUKUM KELUARGA (Akhwal Syaksyah) |
| 4. Jenjang | : S1 |
| 5. Lokasi | : PENGADILAN AGAMA BANGKINANG KELAS 1B |

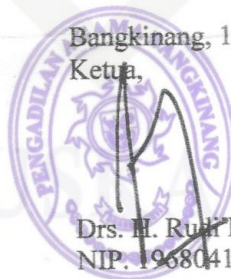
Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan Penelitian yang menyimpang dari ketentuan dalam proposal yang telah ditetapkan atau yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan riset/ pra riset dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan penelitian/ pengumpulan data ini berlangsung terhitung mulai tanggal rekomendasi ini di keluarkan.
3. Menyerahkan Hasil Riset yang telah di Publish.
4. Pelaksanaan kegiatan penelitian/ pengumpulan data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini di keluarkan

Demikian rekomendasi ini diberikan, agar digunakan sebagaimana mestinya.

Bangkinang, 16 Maret 2021

Ketua,



Drs. H. Rudi Hartono, S.H.
 NIP. 196804141994031001

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/38544
TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/1703/2021 Tanggal 5 Februari 2021**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

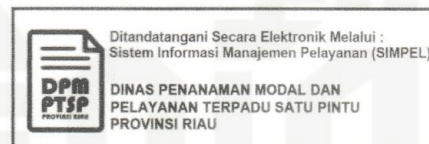
- | | | |
|----------------------|---|--|
| 1. Nama | : | INSINUR SAPUTRI |
| 2. NIM / KTP | : | 11721201125 |
| 3. Program Studi | : | HUKUM KELUARGA |
| 4. Jenjang | : | S1 |
| 5. Alamat | : | PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : | FAKTOR CERAH GUGAT PEGAWAI NEGERI SIPIL PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA BANGKINANG KELAS 1B) |
| 7. Lokasi Penelitian | : | PENGADILAN AGAMA BANGKINANG KELAS 1B |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 9 Februari 2021



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Kampar
3. Up. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik di Bangkinang
4. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
5. Yang Bersangkutan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JALAN TUANKU TAMBUSAI TELP. (0762) 20146

BANGKINANG KOTA

Kode Pos : 28412

REKOMENDASI

Nomor : 070/BKBP/2021/107

Tentang

PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar setelah membaca Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/38544 tanggal 9 Februari 2021, dengan ini memberi Rekomendasi /Izin Penelitian kepada:

- | | |
|---------------------|--|
| 1. Nama | : INSINUR SAPUTRI |
| 2. NIM | : 11721201125 |
| 3. Universitas | : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUSKA RIAU |
| 4. Program Studi | : HUKUM KELUARGA |
| 5. Jenjang | : S1 |
| 6. Alamat | : PEKANBARU |
| 7. Judul Penelitian | : FAKTOR CERAI GUGAT PEGAWAI NEGERI SIPIL PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA BANGKINANG KELAS IB) |
| 8. Lokasi | : PENGADILAN AGAMA BANGKINANG KELAS IB |

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan Penelitian yang menyimpang dari ketentuan dalam proposal yang telah ditetapkan atau yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan riset/pras riset dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan penelitian/pengumpulan data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dikeluarkan.

Demikian rekomendasi ini diberikan, agar digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Riset ini dan terima kasih.

Dikeluarkan di Bangkinang
pada tanggal 16 Februari 2021

an. **KEPALA BADAN KESBANGPOL KAB. KAMPAR**

Kabid. Ideologi, Wawasan Kebangsaan
dan Karakter Bangsa,

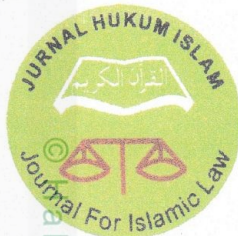

ONNITA, SE
Penata Tk. I
NIP. 19661009 198803 2 003

Rekomendasi ini disampaikan Kepada Yth;

1. Kepala Pengadilan Agama Bangkinang kelas 1B kab. Kampar di Bangkinang Kota
2. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau



JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www. Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com

HP. 081275158167 – 085213573669

SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

NAMA : INSINUR SAPUTRI
NIM : 11721201125
JURUSAN : HUKUM KELUARGA
JUDUL : FAKTOR CERAH GUGAT PEGAWAI NEGERI SIPIL PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA
BANGKINANG KELAS 1B)

Pembimbing: Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc. MA

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 25 Juni 2021

Pimpinan Redaksi



Dr. M. ALPI SYAHRIN, SH., MH., CPL.

NIP. 19880430 201903 1 010

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



RIWAYAT HIDUP PENULIS

INSINUR SAPUTRI lahir di Bangkinang, pada tanggal 01 Februari 2000. Anak terakhir dari enam bersaudara dari pasangan suami istri Ayahanda Suhaimi dan Ibunda Zumarani. Pendidikan penulis dimulai dari SDN 006 di Lk. Tanjung pada tahun 2005-2011. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan di Pondok Pesantren Daarun Nahdhah Thawalib Bangkinang, Angkatan 64 lebih tepatnya angkatan pertama program pembelajaran 6 tahun, pada tahun 2011-2017 yaitu di tingkat Madrasah Tsanawiyah pada tahun 2011-2014 dan di tingkat Madrasah Aliyah pada jurusan agama pada tahun 2014-2017. Setelah menyelesaikan pendidikan di Pondok Pesantren Daarun Nahdhah atau dikenal dengan sebutan *Kampus Biru*, Penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada Fakultas Syariah dan Hukum pada program study Hukum Keluarga (*Ahwal Al-Syakhsiyah*) untuk memperoleh gelar sarjana Hukum dalam jenjang Strata satu (S1).

Penulis mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya atas terselesainya skripsi dengan judul **“FAKTOR CERAI GUGAT PEGAWAI NEGERI SIPIL PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi kasus di Pengadilan Agama Bangkinang Kelas 1B)”** yang dibimbing oleh bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc. Ma. Alhamdulillah pada tanggal 08 Juni 2021 penulis telah menyelesaikan ujian Munaqasah dengan prediket kelulusan “Cum Laude”

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.